

PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TIMUR



# RENJA

## RANCANGAN AKHIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA  
KARYA

20  
25

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021. Renja disusun berdasarkan rencana strategis yang telah di tuangkan di dalam RENSTRA Dinas tahun 2025-2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2025.

Surabaya, Juli 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROPINSI JAWA TIMUR**



**I NYOMAN GUNADI, S.T.,M.T**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690726 199903 1 006**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra... 7	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ..	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur .....	46
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	58
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	82
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN.....	103
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	103
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.....	105
3.3 Program dan Kegiatan .....	107
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	140
4.1 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2025 .....	140
4.2 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur .....	145
BAB 5 PENUTUP.....	168
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan .....	168
5.2 Rencana tindak lanjut.....	169

# DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2023.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur .....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2025.....</i>	<i>101</i>
<i>Tabel 7. Dukungan Dinas pada Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan.....</i>	<i>105</i>
<i>Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 .....</i>	<i>107</i>
<i>Tabel 9. Sinkronisasi permasalahan, isu strategis, dan Tujuan di RPD 2025-2026.....</i>	<i>110</i>
<i>Tabel 10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....</i>	<i>122</i>
<i>Tabel 11. Rencana Kerja yang mendukung Prioritas Pembangunan.....</i>	<i>141</i>
<i>Tabel 12. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 .....</i>	<i>145</i>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Dinas dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan;

- a. Persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;

- d. pelaksanaan forum /lintas bidang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan akhir Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan

- Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  22. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  28. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender;



30. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026
34. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra.

#### b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat:

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan,
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja;
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### **BAB V. PENUTUP**

# BAB 2

## HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

---

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024, Renstra Perubahan Kedua Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 triwulan IV dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel terlampir.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

#### **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp. 114.584.667.219,00 realisasi sebesar Rp. 104.573.448.227 atau 91,26% dari target. Dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan target sebesar 98,94% dan tercapai sebesar 96,01% dengan tingkat capaian kinerja 97,04%

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, dengan target kinerja

jumlah RT yang terlayani akses air minum 2400 RT dan terealisasi 2400 RT, dan memiliki 5 sub kegiatan dengan indikator:

- Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM Regional sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
- Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9 dokumen
- Kapasitas Pembangunan SPAM Regional dari target 12 Liter/detik, terealisasi 10,20 liter/detik, hal ini dikarenakan pada saat tahap perencanaan teknis diketahui debit air tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan tidak ditemukan sumber air baku.
- Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional dengan target 3.100 sambungan rumah dan terealisasi 2.021 sambungan rumah, tidak dapat memenuhi target karena pembangunan pipa tersier belum terlaksana 100%.
- Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM ada 28 Kab/Kota dan terealisasi 30 Kab/kota.

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan anggaran Rp. 1.725.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.211.267.526,- atau 70,22 % dari target. Dengan indikator kinerja Persentase system persampahan regional yang dikembangkan dengan target sebesar 16,63% dan terealisasi sebesar 16,63%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, yang memiliki indikator kinerja jumlah system persampahan yang dikembangkan terdapat 4 sistem dan yang terealisasi 4 sistem, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. 4 sistem yaitu system persampahan regional Gerbangkertosusila (GKS), Kediri, Blitar dan Probolinggo, serta terdapat 3 Sub kegiatan yang memiliki indikator:

- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi 2 dokumen.
- Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen.
- Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebanyak 50 kelompok masyarakat dengan realisasi 25 kelompok masyarakat

dikarenakan tidak adanya anggaran Pokmas untuk perjalanan dinas/ tidak dibiayai oleh instansi di Kab/Kota (ketersediaan anggaran)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp. 6.784.393.000,00 realisasi Rp. 6.158.039.768,- atau 90,77% dari seluruh pagu anggaran. Dengan indikator kinerja : Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dengan target sebesar 89% dan terealisasi sebesar 83,72% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 94,07%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah mempunyai 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, dengan indikator jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah dengan target 500 jiwa dan terealisasi 500 jiwa, dengan indikator sub kegiatan:

- Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat melalui Pembangunan 2 IPAL komunal dengan target terlayani 30 RT terealisasi 52 RT, di Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan Kelurahan lenteng, Kecamatan banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
- Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sebanyak 35 kelompok masyarakat dan terealisasi 46 kelompok masyarakat.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran Rp. 198.153.768.133,00 realisasi sebesar Rp. 179.412.851.845,- atau 90,54% dari seluruh pagu anggaran. Dengan indikator kinerja Persentase system drainase regional yang dikembangkan dengan target sebesar 8,33% dan terealisasi sebesar 8,33% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase mempunyai 1 kegiatan, yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, dengan indikator jumlah akses drainase terbangun dengan target 1000 meter dan terealisasi 1000 meter. Memiliki sub kegiatan dengan indikator :

- Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 70 orang dan terealisasi 76 orang.
- Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit.

Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp. 294.183.162.994,00,- realisasi sebesar 183.876.092.140,- atau 62,50% dari pagu anggaran. Indikator Program Penataan Bangunan Gedung yaitu Presentase penataan bangunan gedung sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%.. Program Penataan Bangunan Gedung mempunyai 1 kegiatan, yaitu Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah Gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi sebanyak 21 gedung dengan terealisasi 21 gedung.. Memiliki sub kegiatan dengan indicator:

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan target 13 dokumen dan terealisasi 13 dokumen.
- Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai dengan target sebanyak 10 Gedung dan terealisasi 10 gedung, karena keterbatasan anggaran APBD 2023.
- Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi dengan target 150 dokumen dan terealisasi 292 dokumen. Realisasi melebihi target karena instansi pemohon bantuan teknis melebihi dari yang direncanakan.
- Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan target 1 unit dan terealisasi 0 unit, karena belum adanya database bangunan Gedung cagar budaya milik Pemerintah Prov. Jawa Timur dan rencana Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) melalui Penataan Situs/Zonasi/Kawasan untuk kepentingan Strategis Provinsi
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara sebanyak 10 dokumen dengan realisasi 10 dokumen

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dengan anggaran Rp. 845.000.000,- realisasi sebesar 610.881.004 atau sebesar 72,29% dari pagu anggaran, dengan indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan sebesar 28,57% dan terealisasi sebesar 28,57 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah Kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan dengan target 2 kawasan dan terealisasi 1 kawasan dan memiliki sub kegiatan dengan indikator:

- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
- Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya dengan target 2 kawasan dan terealisasi 1 kawasan karena belum semua kabupaten/kota di Jawa Timur menyusun dokumen RTRW.
- Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan target 2 dokumen dan terealisasi 1 dokumen karena karena belum semua kabupaten/kota di Jawa Timur menyusun dokumen RTRW.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp. 2.741.398.923,00 realisasi sebesar Rp 2.207.782.923,00 atau sebesar 80,53% dari pagu anggaran, dengan indikator kinerja presentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi bertarget 100% dan terealisasi 100 % (Tingkat capaian kinerja sebesar 100%) dan indeks kepuasan pengguna jasa pengujian konstruksi dan bahan bangunan dengan target 82,5% dan terealisasi 82,5% (Tingkat capaian kinerja 100%). Program Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai 2 kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, dengan indikator Jumlah orang yang mendapatkan pemberdayaan pembinaan jasa konstruksi sebesar 220 orang dan terealisasi 3820 orang dengan indikator sub kegiatan:

- Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang mengikuti Pelatihan sebanyak 60 orang dan terealisasi 3250 orang, banyaknya peserta pelatihan melebihi target yang diperkirakan karena pelaksanaannya dilakukan secara daring.
  - Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi sebanyak 160 orang dan terealisasi 570 orang, banyaknya peserta pelatihan melebihi target yang direncanakan karena dilaksanakan secara hybrid, mengingat banyaknya peserta yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, dengan 2 indikator yaitu jumlah orang yang mendapatkan informasi pembinaan jasa konstruksi sebanyak 89 orang dengan realisasi 89 orang dan presentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan 80% terealisasi 100%. dengan indikator sub kegiatan terdiri dari:
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen
  - Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan sebanyak 85 orang dengan realisasi 85 Orang
  - Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi ada 100 dokumen, terealisasi 387 dokumen.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 6.603.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.455.181.335,- atau sebesar 97,75% dari pagu anggaran, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang sebesar 79 dan terealisasi 79 dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hasil Capaian didapatkan dari hasil pengolahan kuesioner kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melihat kepuasan terhadap kinerja penyelenggaraan dan pembinaan penataan ruang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, mempunyai 4 kegiatan yaitu :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, dengan indikator kinerja presentase kebijakan rencana dan program dalam rangka pelaksanaan penataan ruang dengan target 70% dan terealisasi 70%, indikator sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yakni:



- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen Progres Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
  - Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi ada 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
  - Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang sebanyak 4 dokumen terealisasi 5 dokumen
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, dengan indikator jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang dilakukan sebanyak 12 kegiatan dan terealisasi 109 kegiatan, dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota ada 10 dokumen realisasi 109 dokumen.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi yang dilakukan dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan, dengan indikator sub kegiatan:
    - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah ada 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen.
    - Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang ada 2 kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan, dan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ada 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen
- Program Pengembangan Permukiman dengan anggaran Rp. 11.650.738.366,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.250.005.236,- atau sebesar 96,56% dari anggaran, dengan indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah provinsi ada 973 rumah tangga dan terealisasi 973 rumah tangga atau Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengembangan Permukiman mempunyai 1

kegiatan yaitu Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja presentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara sebesar 100% dan realisasi 100%. Memiliki indikator sub kegiatan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara dengan target 5 sistem jaringan (rusunawa) dan terealisasi 5 sistem jaringan (rusunawa).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 58.184.899.111 dan realisasi sebesar Rp. 54.782.504.095,- atau 94,15% dari seluruh pagu anggaran Dengan target indikator kinerja :

- Indeks Profesionalisme ASN sebesar 82% dan terealisasi sebesar 74,72%/ 75% (nilai sementara)
- Presentase target realisasi anggaran sebanyak 90% dan terealisasi sebanyak 86,13% atau Tingkat capaian kinerjanya sebesar 95,70% hal ini dikarenakan, karena masih ada beberapa kegiatan yang belum tuntas di Tahun 2023, yaitu pengadaan tanah IISP yang tidak terlaksana di Tahun 2023, 3 kegiatan Pembangunan Gedung yang tidak selesai di Tahun 2023, dan akan dibayarkan sisanya di 2024, dan belanja modal Pembangunan tanah untuk bangunan SPAM Regional Umbulan yang tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2023.
- Presentase Indikator Program yang Tercapai target sebesar 90,43% dan terrealisasi sebanyak 77,78% atau Tingkat capaian kinerjanya sebesar 86,01% yang disebabkan karena ada 4 indikator program yang tidak mencapai target dari total 18 indikator program.

Program penunjang ini terdiri dari 9 kegiatan yaitu :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.470.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.412.899.487,- atau 97,69% .
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 36.161.896.000 realisasi sebesar Rp. 33.836.798.165,- atau 91,26%
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 22.320.000,- realisasi sebesar Rp 16.917.120,- atau 75,79%
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 138.787.000 realisasi sebesar Rp 134.750.430,- atau 97,09%

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 875.420.722 realisasi sebesar Rp 780.266.950,- atau 89,13%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 5.005.632.237 dan realisasi sebesar Rp. 4.774.805.513,- atau 95,39%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 2.433.149.620 dan realisasi sebesar Rp 2.405.208.400,- atau 98,85%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 9.441.367.235 dan realisasi sebesar Rp 9.047.944.362,- atau 95,83%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 1.433.765.634 dan realisasi sebesar Rp 1.372.913.668,- atau 95,76%

### **Urusan Perumahan**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam menjalankan tupoksinya untuk urusan pertanahan, melaksanakan program-program diantaranya:

Program Pengembangan Perumahan, dengan anggaran Rp. 330,960,000 dan terealisasi sebesar Rp 301.724.532 atau sebesar 91,17% dari seluruh anggaran, dengan indikator kinerja presentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan Kawasan permukiman di jatim target 5 % dengan realisasi 5 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengembangan Perumahan, mempunyai 1 kegiatan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan indikator kinerja jumlah dokumen identifikasi dan pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen. Terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, dengan indikator:

- Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi dengan target kinerja 1 dokumen, dan terealisasi 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dengan target kinerja 1 dokumen, dan terealisasi 1 dokumen

- Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

Program Kawasan Permukiman, dengan anggaran sebesar Rp. 47.134.165.722 realisasi sebesar Rp. 45.675.275.811 atau sebesar 96,90% dari seluruh anggaran, dengan indikator kinerja presentase penanganan kawasan permukiman kumuh dengan target 11,56 % dan terealisasi 11,56 % dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Program Kawasan Permukiman, mempunyai 2 kegiatan, yaitu :

- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan indikator kinerja Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan target 20,90% dan terealisasi 20,90%. Didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman target 3 laporan dan realisasi 3 laporan.
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan indikator kinerja Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan target kinerja 9 Ha dan terealisasi sebesar 9 Ha. Terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini :
  - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan indikator Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan target 4 dokumen realisasi 4 dokumen
  - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan indikator Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar dengan target 3 Ha terealisasi 3 Ha

- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha terdapat 7 dokumen dan terealisasi 7 dokumen

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan anggaran sebesar Rp478.045.277.825 dan terealisasi sebesar Rp. 454.828.769.562 atau sebesar 95,14% dari pagu anggaran, dengan indikator kinerja presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU dengan target 21 % terealisasi 21% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, dengan indikator kinerja jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU ada 22 kawasan yang terealisasi 22 kawasan. memiliki 3 sub kegiatan:

- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman yang berindikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya/Umum dan Komersial dengan total target 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen.
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman berindikator Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman yang mempunyai target 110 lokasi dan terealisasi 110 lokasi.

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen

### **Urusan Pertanahan**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dalam menjalankan fungsinya pada urusan pertanahan, melaksanakan beberapa program yaitu:

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan anggaran Rp. 378.230.000 dengan realisasi sebesar Rp. 370.618.343 atau 97,99 % Dengan indikator kinerja Presentase pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diterbitkan sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen, sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan indikator Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen

Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 1.010.100.000 realisasi sebesar Rp. 867.478.055 atau 85,88% Dengan indikator kinerja Persentase dokumen penatagunaan tanah yang telah tersusun sebesar 77% dan terealisasi sebesar 77%, mempunyai Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dengan indikator Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan

Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan anggaran Rp 33.100.000 realisasi sebesar Rp 31.114.500 atau 94,00% dengan indikator Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi bertarget kinerja 100% terealisasi 100%, dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%, program ini memiliki 1 kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi ada 2 kasus dan terealisasi 2 kasus, dengan dukungan 1 sub kegiatan yakni :

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 2 Berita Acara dan terealisasi 2 Berita Acara.

**Implikasi tdk tercapai**

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan program / kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 secara garis besar yaitu :

**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan**

Permasalahan :

- a. Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa permasalahan teknis lapangan, seperti belum jelasnya status kepemilikan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan IISP, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan IISP tidak dapat direalisasikan.
- b. Keterbatasan debit sumber air baku di beberapa lokasi kegiatan fisik pembangunan SPAM, sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan air minum.
- c. Belum siapnya jaringan perpipaan hingga ke sambungan rumah (SR) mengakibatkan penyerapan kapasitas produksi SPAM Regional oleh PDAM Kabupaten/Kota tidak optimal. Di sisi lain kemampuan anggaran kabupaten/kota untuk menyediakan sambungan rumah ke masyarakat sangat terbatas.
- d. Masih terdapat kurang lebih 15 Kabupaten di Jawa Timur yang belum 100% ODF (Open Defecation Free) dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- e. Terdapat 3 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung yang belum selesai dilaksanakan dan melebihi tahun anggaran di tahun 2023 sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran dan pencapaian target rencana output.
- f. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana di dokumen anggaran karena kendala teknis dilapangan sebelum pelaksanaan konstruksi, misalnya keterbatasan luasan lahan dan merupakan jalan inspeksi kebakaran, sehingga ruang lingkup dan lokasi yang berubah, akibatnya anggaran yang direncanakan menjadi tidak sesuai lagi. Permasalahan ini menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.
- g. Penyusunan dokumen inventarisasi tanah di lintas kabupaten/kota dalam rangka penatagunaan tanah seringkali didapati tanah-tanah

yang tidak sesuai dengan peruntukkan penggunaan tanahnya ataupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang

- h. Penetapan bangunan cagar budaya tidak dapat dilakukan dikarenakan belum mempunyai data base bangunan Gedung cagart budaya milik pemerintah Provinsi Jawa Timur
- i. Penyusunan RTBL tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan Kab/Kota belum Menyusun RDTR Kab/Kota

Upaya Pemecahan Permasalahan :

- a. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan teknis terkait status kepemilikan lahan antara lain dengan melakukan koordinasi dengan pemilik lahan dan BPN Provinsi Jawa Timur.
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan PU SDA terkait ketersediaan air baku, melakukan inovasi/rekayasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum di daerah-daerah dengan sumber air baku terbatas dengan memperhitungkan efisiensi anggaran.
- c. Diperlukan sinergitas dan komitmen terhadap penyediaan anggaran prioritas pembangunan jaringan air minum sehingga capaian bisa maksimal.
- d. Salah satu upaya meningkatkan cakupan pelayanan akses sanitasi layak antara lain dengan memaksimalkan sinergitas program antar instansi baik dari segi sumber pendanaan alternatif di luar APBD provinsi serta melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, CSR, pihak swasta dan masyarakat.
- e. Mengoptimalkan survey pendahuluan dan perencanaan Pembangunan konstruksi agar permasalahan dilapangan dapat diketahui lebih awal.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi konstruksi fisik pembangunan gedung, sehingga diharapkan konstruksi fisik pembangunan Gedung dapat selesai di waktu yang telah direncanakan dan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
- g. Melakukan inventarisasi dan Koordinasi/Sinkronisasi Data, serta Sinergitas/Kolaborasi dengan Pihak-pihak terkait dalam rangka Pelestarian BGCB untuk Kepentingan Strategis Provinsi.
- h. Mendorong Kab/Kota untuk Menyusun RDTR agar dapat ditindaklanjuti untuk Menyusun RTBL dan pada akhirnya daapat dilanjutkan dengan peningkatan pembangunan kualitas infrastruktur Kawasan tersebut.



## **Faktor Pendorong**

Beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong kinerja Dinas antara lain:

- Hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan telah terjalin baik termasuk koordinasi dengan lintas unit organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga berbagai kendala baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial dapat diminimalkan.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan pekerjaan yang lebih cepat, efisien dan efektif
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi kinerja serta pemantauan dan evaluasi kinerja tiap bulan untuk pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut apabila ada permasalahan sehingga dapat diselesaikan secepatnya
- Dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang sangat membantu dan mendukung selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

## **Faktor Penghambat**

Selain faktor pendorong, beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja Dinas, antara lain:

- Permasalahan-permasalahan yang dialami pada masa persiapan lelang, meliputi penyiapan dokumen perencanaan dan lelang yang tidak maksimal, pemenuhan readiness criteria yang belum maksimal, ketersediaan lahan yang belum clean and clear
- Proses evaluasi dokumen lelang yang memakan waktu lama, sehingga mengakibatkan pergeseran timeline pelaksanaan
- Belum optimalnya informasi mengenai rencana tata ruang kepada seluruh lapisan masyarakat umum dan investor, Kurangnya pengetahuan kapasitas Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Timur, Dalam hal Penilaian Pelaksanaan KKPR, khususnya pada Penilaian PMP UMK, terdapat kesulitan memperoleh data PMP UMK, sehingga belum dapat melakukan penilaian pelaksanaan PMP UMK
- Terbatasnya jumlah SDM dalam proses perencanaan hingga pekerjaan fisik tidak seimbang dengan banyaknya jumlah paket pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- Masih banyaknya penyusun DPPT yang belum memahami secara menyeluruh pedoman penyusunan DPPT sesuai dengan permen ATR no. 19 tahun 2021

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>95,05</b>	<b>98,94</b>	<b>96,01</b>	<b>97,04%</b>	<b>100</b>	<b>96,01</b>	<b>96,01%</b>
1.03.03.1.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT yang terlayani akses air minum</b>	<b>RT</b>	<b>10521516</b>	<b>10516716</b>	<b>1 0519116</b>	<b>10519116</b>	<b>100%</b>	<b>10521516</b>	<b>10521516</b>	<b>100%</b>
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	dokumen	13		9	9	100%		9	69,23%
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokumen	2					2	2	100%
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	dokumen	7	5					5	71,43%
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	dokumen	2		1	1	100%		1	50%
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	Unit	180	87					87	48,33%
		Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	32		12	10,20	85%		10	31,88%
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	30					30	30	100%
1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	Unit	4	2					2	50%
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR	6000		3100	2.021	65%		2.021	33,68%
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	Orang	450	200					200	44,44%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota	28		28	28	100%		28	100%
1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	150					150	150	100%
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan</b>	<b>persen</b>	<b>21,5</b>	<b>12,19</b>	<b>16,63</b>	<b>16,63</b>	<b>100%</b>	<b>21,50</b>	<b>16,63</b>	<b>77,35%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.04.1.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan</b>	<b>sistem</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	dokumen	8	4					4	50%
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	dokumen	4		2	2	100%		2	50%
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	dokumen	3					3	3	100%
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	unit	1	1					1	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	unit	2						0	0%
1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	0,5					0,5	0,5	100%
1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Kab/ Kota	11	11					11	100%
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4		4	4	100%	4	4	100%
1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten/ Kota	11					11	11	100%
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	Orang	400	238					238	59,50%
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Masyarakat	100		50	25	50%		25	25%
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	100					100	100	100%
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak</b>	<b>persen</b>	<b>95</b>	<b>81,13</b>	<b>89</b>	<b>83,72</b>	<b>94,07%</b>	<b>95</b>	<b>83,72</b>	<b>88,13%</b>
1.03.05.1.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah</b>	<b>jiwa</b>	<b>35641908</b>	<b>35640908</b>	<b>35641408</b>	<b>35641408</b>	<b>100%</b>	<b>35641908</b>	<b>35641908</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen	6	3					3	50%
		Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	dokumen	3		1	1	100%		1	33%
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen	1					1	1	100%
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	Unit	8	0					0	0%
		Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	RT	90		30	30	100%		30	33%
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari	15					15	15	100%
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	Orang	300	245					245	82%
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	85		35	35	100%		35	41%
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	100					100	100	100%
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>persen</b>	<b>8,33</b>	<b>4,17</b>	<b>8,33</b>	<b>8,33</b>	<b>100%</b>	<b>8,33</b>	<b>8,33</b>	<b>100%</b>
<b>1.03.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	<b>Jumlah akses drainase terbangun</b>	<b>meter</b>	<b>3000</b>	<b>1.000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>	<b>1000</b>	<b>3.000</b>	<b>100%</b>
1.03.06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	Orang	220	100					100	45%
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	orang	370		70	70	100%		70	19%
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan	Jumlah infrastruktur drainase	Paket/Unit	12	0					0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	unit	5		1	1	100%		1	20%
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	4					4	4	100%
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>rumah tangga</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>100%</b>		<b>973</b>	<b>100%</b>
<b>1.03.07.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>
1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dikelola	Rusunawa	4	4					4	100%
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Sistem Jaringan	5		5	5	100%		5	100%
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Presentase Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	88	48	27	27	100,00%	8	83	94,32%
		jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	unit	973					973	973	100%
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun	gedung	22	18					18	82%
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	22		15	13	86,67%	10	23	105%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	7					7	7	100%
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	5					5	5	100%
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	26	26					26	100%
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	gedung	16		12	10	83,33%	10	20	125%
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	1					1	1	100%
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	laporan	300	200					200	67%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	Orang	440	220					220	50%
		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	300		150	150	100,00%		150	50%
1.03.08.6.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	220					220	220	100%
1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	Dokumen	5	5					5	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah gedung cagar budaya yang ditetapkan dan direhabilitasi	gedung	0	0					0	0%
		Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	4		1	0	0%		0	0%
1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	1					1	1	100%
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	Dokumen	100	100					100	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	20		10	10	100%		10	50%
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	15					15	15	100%
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>persen</b>	<b>33,33</b>	<b>20</b>	<b>28,57</b>	<b>28,57</b>	<b>100%</b>	<b>33,33</b>	<b>28,57</b>	<b>85,72%</b>
<b>1.03.09.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>Kawasan</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>66,67%</b>
		Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/kota	Dokumen	4	2					2	50%
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3		1	1	100%	2	3	100%
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1					1	1	100%
		Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	Dokumen	2	2					2	100%
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	Kawasan	4		2	1	50%	2	3	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Lainnya									
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	2					2	2	100%
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	6	2	2	1	50%		3	50%
1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		<b>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan</b>		<b>83</b>	<b>83</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>100%</b>	<b>83</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40%</b>
1.03.11.1.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>1.730</b>	<b>1.250</b>	<b>220</b>	<b>3820</b>	<b>100%</b>	<b>210</b>	<b>5.280</b>	<b>305,20%</b>
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Orang	1560	660					660	42%
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang	160		60	3.250	5416,67%		3.250	2031%
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	160					160	160	100%
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	Orang	890	590					590	66%
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	320		160	160	100%	160	320	100%
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50					50	50	100%
1.03.11.1.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>2.263</b>	<b>2.085</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>105%</b>	<b>100</b>	<b>2.274</b>	<b>100,49%</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80	100	80	100	125%	100	100	125%
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	buletin	4.000	2.000					2.000	50%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	8		4	4	100%	4	8	100%
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	3					3	3	100%
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	Orang	170	85					85	50%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	orang	170		85	85	100%		85	50%
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	100					100	100	100%
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pengujian yang diinformasikan	Dokumen	200	220					220	110%
		Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	200		100	100	100%	100	200	100%
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	100					100	100	100%
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim</b>	<b>Persen</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83,33%</b>
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>92,31%</b>
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	5	1					1	20%
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3		1	1	100%		1	33%
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	2					2	2	100%
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	4		1	1	100%		1	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2					2	2	100%
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	Dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	3		1	1	100%		1	33%
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2					2	2	100%
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>persen</b>	<b>12,18</b>	<b>11</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>100%</b>	<b>12,18</b>	<b>11,56</b>	<b>94,91%</b>
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	persen	36,57	7,46	20,90	20,90	100%	36,57	20,90	57,15%
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	10	3	3	3	100%		6	60%
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	3					3	3	100%
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	41	8	9	9	100%	10	27	65,85%
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	17	6					6	35%
		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	11		4	4	100%		4	36%
1.04.03.1.02.04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di	Jumlah laporan pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	Dokumen	19	7					7	37%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	13		7	7	100%		7	54%
1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	2					2	2	100%
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	Meter	3.156	1.156					1.156	37%
		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	11		3	1	33,33%		1	9%
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Ha	10					10	10	100%
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>persen</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>91,67%</b>
<b>1.04.05.1.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU</b>	<b>Kawasan</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>26</b>	<b>72</b>	<b>100,00%</b>
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	Dokumen	37	25					25	68%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Umum dan Komersial	Dokumen	7	4					4	57%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	12		8	3	37,50%		3	25%
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	9					9	9	100%
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman swadaya yang dibangun	Meter	7.997,95	5.497,95					5.498	69%
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman umum dan Komersial yang dibangun	Meter	3.749	1.249					1.249	33%
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	lokasi	39		110	24	21,82%		24	62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.04.05.1.01.000 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang <u>Menunjang Fungsi Permukiman</u>	lokasi	26					26	26	100%
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Laporan	18	14					14	78%
		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Umum dan Komersial	Laporan	2	1					1	50%
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	6		4	4	100%		4	67%
1.04.05.1.01.000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	2					2	2	100%
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100%</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>98,75%</b>
<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>87,50%</b>
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	Persen	85	75					75	88%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	1		1	1	100%		1	100%
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	1		1	1	100%		1	100%
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Orang	180	100					100	56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	7		4	4	100%		4	57%
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	200					200	200	100%
<b>1.03.12.1.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>34</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>198</b>	<b>582,35%</b>
1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen RRTR Provinsi yang disusun	Dokumen	1						0	0%
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota	Dokumen	5						0	0%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Dokumen	19	69					69	363%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	20		10	10	100%		10	50%
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	10					10	10	100%
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Berita Acara	10					10	10	100%
<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	Dokumen	3	2					2	67%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	2		1	1	100%		1	50%
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen	1					1	1	100%
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	Konten	20	10					10	50%
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	2		1	1	100%		1	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	dokumen	1					1	1	100%
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	10					10	10	100%
<b>1.03.12.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>72</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>51,39%</b>
1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen	0		0				0	0%
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	1						0	0%
1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan)	dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	1						0	0%
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan perizinan	Lokasi	30	30					30	100%
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	37		2	2	100%		2	5%
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	2					2	2	100%
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.10.03.1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>66,67%</b>
2.10.03.1.01.01/ 2.10.03.1.01.000	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana	Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	Dokumen	20	20					20	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1	Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	30		10	10	100%	20	30	100%
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>77%</b>
<b>2.10.10.1.01</b>	<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kegiatan	2	2					2	100%
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	5		2	2	100%		2	40%
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3					3	3	100%
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>2.10.04.1.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi</b>	<b>Kasus</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>34%</b>
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1					1	100%
		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1						0	0%
2.10.04.1.01.02/ 2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5					5	100%
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	7		2	2	100%	5	7	100%
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>	<b>Persen</b>	<b>90,62</b>	<b>88,89</b>	<b>90,43</b>	<b>77,78</b>	<b>86,01%</b>	<b>90,62</b>	<b>77,78</b>	<b>85,83%</b>
		<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>88,17</b>	<b>90</b>	<b>86,13</b>	<b>95,70%</b>	<b>90</b>	<b>86,13</b>	<b>95,70%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Indeks profesionalitas ASN		85	84,52	82	82	100%	85	82	96,47%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPT)	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	90,62	88,89	90,43	77,78	86,01%	90,62	77,78	85,83%
		Persentase realisasi anggaran	Persen	90	88,17	90	86,13	95,70%	90	86,13	95,70%
		Indeks Profesionalitas ASN		85	84,52	82	82	100%	85	82	96,47%
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	22	7	7	7	100%	8	22	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	12	4	4	4	100%	4	12	100%
1.03.01.1.01.01 / 1.03.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	22	7	7	7	100%	8	22	100%
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	1					1	100%
1.03.01.1.01.02 / 1.03.01.1.01.000 2		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	1	1	100%	1	2	100%	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	1	1					1	100%
1.03.01.1.01.03 / 1.03.01.1.01.000 3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2	1	1	100%	1	2	100%	
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	1					1	100%
1.03.01.1.01.04 / 1.03.01.1.01.000 4		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	1	1	100%	1	2	100%	
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	1	1					1	100%
1.03.01.1.01.05 / 1.03.01.1.01.000 5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	1	1	100%	1	2	100%	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	5	5					5	100%
1.03.01.1.01.06 / 1.03.01.1.01.000 6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	5	5	100%	5	10	100%	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	4	4					4	100%
1.03.01.1.01.07 / 1.03.01.1.01.000 7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	4	4	100%	4	8	100%	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	36	12	12	12	100%	12	36	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	12	12					12	100%
1.03.01.1.02.01/1.03.01.1.02.0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	176		185	185	100%	176	176	100%
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.02.02/1.03.01.1.02.0002		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	24	12	12	12	100%	12	36	150%
1.04.01.1.02.02/1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	12					12	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	24		12	12	100%	12	24	100%
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan keuangan	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.02.03/1.03.01.1.02.0003		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24		12	12	100%	12	24	100%
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.02.04/1.03.01.1.02.0004		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	24		12	12	100%	12	24	100%
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	Dokumen	2	2					2	100%
1.03.01.1.02.05/1.03.01.1.02.0005		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4		2	2	100%	2	4	100%
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	1	1					1	100%
1.03.01.1.02.06/1.03.01.1.02.0006		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.02.07/1.03.01.1.02.0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	24		12	12	100%	12	24	100%
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	1	1					1	100%
1.03.01.1.02.08/1.03.01.1.02.0008		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2		1	1	100%	1	2	100%
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah	laporan	1	1					1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.01.1.03.03/ 1.03.01.1.03.000 3		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.03.06/ 1.03.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	4	2	1	1	100%	1	4	100%
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.03.01/ 1.03.01.1.03.000 1		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	4	4					4	100%
1.03.01.1.03.05/ 1.03.01.1.03.000 5		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	8		4	4	100%	4	8	100%
<b>1.03.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.04.07/ 1.03.01.1.04.000 7		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	24		12	12	100%	12	24	100%
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>Laporan</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	paket	12	12					12	100%
1.03.01.1.05.01/ 1.03.01.1.05.000 1		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	13		1	1	100%	12	13	100%
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.05.03/ 1.03.01.1.05.000 3		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	13		1	1	100%	12	13	100%
1.03.01.1.05.04		Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.05.04/ 1.03.01.1.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	13		1	1	100%	12	13	100%
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	12	12					12	100%
1.03.01.1.05.05/ 1.03.01.1.05.000 5		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	13		1	1	100%	12	13	100%
1.03.01.1.05.09/ 1.03.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	1	1					1	100%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21		20	20	100%	1	21	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Dokumen	44	11	11	11	100%	11	33	75%
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	dokumen	33	11	11	11	100%	11	33	100%
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.01/1.03.01.1.06.0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.06.02		Jumlah paket pengadaan	paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.02/1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.06.02/1.04.01.1.06.0002		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.04.01.1.06.02/1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		3	3	100%	1	4	100%
1.03.01.1.06.03		Jumlah paket pengadaan	paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.03/1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.06.04		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.04/1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.06.04/1.04.01.1.06.0004		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.04.01.1.06.04/1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		4	4	100%	1	5	100%
1.03.01.1.06.05		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.05/1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.06.05/1.04.01.1.06.0005		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.04.01.1.06.05/1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		3	3	100%	1	4	100%
1.03.01.1.06.06		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.06/1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.06.06/1.04.01.1.06.0006		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1					1	100%
1.04.01.1.06.06/1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.06.07/		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1				1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.04.01.1.06.0007		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10		9	9	100%	1	10	100%
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	40	40					40	100%
1.03.01.1.06.08/1.03.01.1.06.0008		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	41		1	1	100%	40	41	100%
1.03.01.1.06.09		Jumlah Laporan	Laporan	1	1					1	100%
1.03.01.1.06.09/1.03.01.1.06.0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.06.09/1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1					1	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen	3	0					0	0%
1.03.01.1.06.10/1.03.01.1.06.0010		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6		3	3	100%	3	6	100%
1.03.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Laporan</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>
1.04.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Laporan</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>
1.03.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	2	2					2	100%
1.03.01.1.07.01		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							0	0%
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.07.06/1.03.01.1.07.0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3		2	2	100%	1	3	100%
1.04.01.1.07.06/1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	1	1					1	100%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5		4	4	100%	1	5	100%
1.03.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
1.04.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	1	1					1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.01.1.08.01/ 1.03.01.1.08.000 1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2		1	0	0%	1	1	50%
1.04.01.1.08.01/ 1.04.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	1	1					1	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12					12	100%
1.03.01.1.08.02/ 1.03.01.1.08.000 2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15		3	3	100%	12	15	100%
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket	8	8					8	100%
1.03.01.1.08.04/ 1.03.01.1.08.000 4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9		1	1	100%	8	9	100%
1.04.01.1.08.04/ 1.04.01.1.08.000 4		Jumlah Jasa	Paket	1	1					1	100%
1.04.01.1.08.04/ 1.04.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2		1	1	100%	1	2	100%
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>Laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
<b>1.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.09.01/ 1.03.01.1.09.000 1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30		30	30	100%	30	60	200%
1.04.01.1.09.02/ 1.04.01.1.09.000 2		Jumlah Jasa	paket	1	1					1	100%
1.04.01.1.09.02/ 1.04.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	8	8					8	100%
1.03.01.1.09.06/ 1.03.01.1.09.000 6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28		20	15	75%	8	23	82%
1.04.01.1.09.06/ 1.04.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	1	1					1	100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4		3	3	100%	1	4	100%
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1	1					1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)		Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Kinerja Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.01.1.09.09/ 1.03.01.1.09.000 9	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		1	1	100%	1	2	100%
1.04.01.1.09.09/ 1.04.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		1	1	100%	1	2	100%
1.03.01.1.09.11/ 1.03.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	1	1					1	100%
1.03.01.1.09.11/ 1.03.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		1	1	100%	1	2	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam NSPK, IKD dan SPM sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2021 dan Permen PUPR nomor 13 tahun 2023.

Jenis Indikator yang dikaji berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur antara lain terkait dengan persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, persentase cakupan pelayanan akses sanitasi aman dan air minum layak, dan persentase penyelenggaraan penataan ruang.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur yang menjadi tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah

- a. Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni, dengan definisi operasional merupakan rerata persentase capaian pelayanan akses air minum, persentase cakupan pelayanan sanitasi layak dan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh kinerja program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dan Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahun 2023 kesepakatan capaian berasal dari BPS akses air minum layak 96,01%, sanitasi layak 83,72% dan RT rumah layak huni 70,74%
- b. Presentase Kasus sengketa yang termediasi dengan definisi operasional perbandingan jumlah sengketa yang difasilitasi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa. Adapun tahap yang dilakukan melalui fasilitasi proses tindak lanjut dari seluruh permohonan kasus sengketa tanah yang masuk yang kemudian akan ditelaah yang selanjutnya dilakukan mediasi yaitu proses koordinasi yang melibatkan pihak pemohon, termohon dan pihak-pihak terkait guna penyelesaian kasus sengketa sehingga diharapkan pada akhirnya dapat terselesaikan dengan berita acara bahwa kasus telah ditutup. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh kinerja program

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, program penyelesaian sengketa tanah garapan dan program penatagunaan tanah.

Tahun 2022 inventarisasi data pertanahan terdiri dari inventarisasi dan rencana penggunaan tanah lintas di Pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi dan Pansela. Tahun 2023 pelaksanaan inventarisasi data pertanahan dilaksanakan pada inventarisasi dan rencana penggunaan tanah lintas di Kawasan Sungai Brantas (saluran primer) dan Pembangunan jalan Pansela II (Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi). Tahun 2023 terdapat 110 permohonan fasilitasi permasalahan pertanahan yang terdiri dari 32 permohonan ditujukan kepada Gubernur dan 78 permohonan ditujukan kepada instansi lainnya dengan Gubernur sebagai tebusan.

Dalam meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni yang diperoleh dari perhitungan perbandingan jumlah rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga yang ada di Jawa Timur yang dipengaruhi oleh kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah, drainase, pengembangan permukiman, Kawasan permukiman, pengembangan perumahan, dan peningkatan PSU. Demi terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dilakukan dengan indikator sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang yang diperoleh dari perhitungan kesesuaian hasil overlay peta polar ruang (Kawasan Lindung budaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru, melalui dukungan kinerja Program penyelenggaraan penataan ruang.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota merupakan indikator dari SPM bidang pekerjaan umum berasal dari 2 SPAM regional Umbulan dan Mojolagres dimana kapasitas air curah total umbulan sebesar 3920 liter/detik dan Mojolagres masih sebesar 200 liter/detik. Kinerja capaian pelayanan sesuai dengan permintaan penyerapan PDAM pertahun dan yang telah melayani Masyarakat (SR). Tahun 2022 kapasitas produksi air Umbulan terealisasi sebesar 2700 liter/detik dengan target yang disepakati sesuai skema bisini adalah 3160 lt/detik, sedangkan kebutuhan kapasitas air minum curah SPAM regional



Mojolagres sebesar 300 liter/detik akan tetapi tahun 2022 kapasitas produksi terealisasi sebesar 200 liter/detik, sehingga didapatkan capaian sebesar 86,31%. Capaian pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota tahun 2023 di dapatkan dari dua SPAM Regional yang dimiliki oleh Jawa Timur yaitu: Air minum curah SPAM Umbulan dengan kapasitas air minum curah yang bisa di produksi adalah sebanyak 3.920 l/dt untuk melayani 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab Gresik yang sudah di manfaatkan oleh masyarakat di 3 kabupaten dan 2 kota status per tanggal 31 Desember 2023 sebesar 2269,67 liter/detik dengan rencana/ target penyaluran 2348 Liter/detik adanya penurunan debit air dikarenakan terdapat banyak pengeboran di dekat sumber air. Air curah SPAM Mojolagres dengan kapasitas air curah yang bisa di produksi adalah sebanyak 300 l/dt untuk melayani 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik dan Kab.Lamongan. Sampai dengan tahun 2023 IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang terbangun masih berkapasitas 200 lt/dt terdiri dari kapasitas 50 lt/dt dan 150 lt/dt. Sedangkan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 188,38 liter/detik, perlunya ditambah pembangunan IPA 100 lt/dt agar pemenuhan air yang diproduksi bisa maksimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur belum memiliki sarana dan prasarana SPAL Domestik Regional untuk melayani limbah rumah tangga akan tetapi telah menyusun dokumen RISPAL. Pelayanan air limbah terhadap masyarakat masih berupa MCK Komunal dan IPAL Komunal yang mencakup beberapa rumah pada satu kawasan permukiman, untuk itu perlu inisiasi untuk mulai merencanakan oembangunan IPLT regional yang dapat dimulai dengan penyusunan masterplan sanitasi regional terlebih dahulu. Pada tahun 2023 tidak ada pelaksanaan kegiatan infrastruktur air limbah regional, oleh karena itu untuk capaian yang diperoleh Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/ Kota masih dianggap 100%

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi tercapai 100% karena tidak terdapat kejadian bencana alam provinsi yang ditetapkan oleh SK Gubernur. Akan tetapi Provinsi membantu Kabupaten/ Kota melalui anggaran BTT yang kekurangan anggaran dalam penanggulangan bencana di Kabupaten/ Kota tersebut.

Hal ini juga berlaku pada indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi karena tahun 2023 tidak ada program pemerintah provinsi yang berdampak di relokasi sehingga capaian 100%, akan tetapi Provinsi membantu usulan Pemerintah Kota Surabaya dalam menampung warga relokasi Kampung 1001 Malam di Krembangan Surabaya yang bertempat tinggal illegal dibawah kolong jembatan ke Rusunawa Sumurwelut milik Provinsi Jawa Timur. Dukungan kinerja program dalam indikator SPM ini melalui program pengembangan perumahan dengan 3 sub kegiatan identifikasi perumahan di Lokasi rawan bencana provinsi, identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, pendataan rumah sewa milik Masyarakat, rumah susun dan rumah khusus.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD	SPM (Permen PUPR 13 Tahun 2023)	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	V		V		90,16%	90,17%	80,82%	83,49	90.15%	90,16%	90,17%	
2	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	V		V				100%	100%	80%			
3	Persentase kesesuaian rencana tata ruang		V			91%	91,50%	92,53%	93,37	90%	91%	91,50%	
4	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni		V			75,45	75,50%	66,28%	70,74	75.44%	75,45	75,50%	
5	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat		V					85,11%	85,2	89,09%			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD	SPM (Permen PUPR 13 Tahun 2023)	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
	daerah												
6	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi		V			80%	80%				80%	80%	
7	Persentase Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				V	100%	100%	86,31%	96,47	96,95%	100%	100%	sesuai dengan permintaan penyerapan PDAM pertahun dan yang telah melayani Masyarakat (SR)
8	Persentase Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota				V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum memiliki SPAL Regional, tahun 2021 masih Menyusun dokumen RISPAL

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD	SPM (Permen PUPR 13 Tahun 2023)	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi				V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada bencana alam yang ditetapkan oleh SK Gubernur
10	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi				V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strategis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pelayanan daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan SDG's; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah berkontribusi dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah, yang secara rinci isu-isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Isu Strategis terkait yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

- a. Penanganan Kawasan kumuh permukiman belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman karena penambahan dan perubahan baseline Kawasan

kumuh serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.

- b. Kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima asset
- c. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana. Terdapat batasan rehabilitasi dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dan yang diperbolehkan menerima bantuan adalah 3 tahun berturut-turut belum menerima bantuan. Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BPNPB sehingga dibutuhkan upaya koordinasi
- d. Ketersediaan sumber air baku Terbatasnya ketersediaan sumber air baku untuk SPAM Regional dan daerah rawan air serta penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
- e. Regulasi terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Kewenangan provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM/SPAL/Drainase/TPA lintas daerah Kabupaten/Kota di Kawasan strategis dan daerah rawan air
- f. Pelayanan akses air minum layak dan aman Cakupan pelayanan akses air minum layak hingga Tahun 2022 baru mencapai 95,05% dan target sampai 2024 yang harus dipenuhi sebesar 100% sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Peningkatan kinerja SPAM regional Umbulan dan Mojolagres sangat berperan dalam meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum layak. Kinerja SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres hingga Tahun 2022 telah mencapai 86,31%. Target air minum aman sampai 2026 sebesar 38,38% dimana dibutuhkan uji keamanan dari kualitas air minum yang aman dikonsumsi.
- g. Pelayanan akses sanitasi layak dan aman Cakupan pelayanan akses sanitasi layak hingga Tahun 2022 telah mencapai 81,13% dan target sampai 2024 yang harus dipenuhi sebesar 95%. Target sanitasi aman sampai 2024

sebesar 20% dimana dibutuhkan pengolahan limbah domestic ke IPLT. Belum optimalnya cakupan pelayanan akses sanitasi layak karena proses pembangunan IPAL Regional membutuhkan waktu yang panjang dan perlu koordinasi yang intens antar kabupaten-kabupaten yang terlibat, sehingga pembangunan fisik IPAL regional belum dapat terlaksana akan tetapi sudah disusun RISPAL di tahun 2021, belum tersedianya TPA regional, regulasi terkait kesepakatan lahan dan aset (kerjasama pengelolaan persampahan regional, masih belum tersedianya masterplan perencanaan sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota, sehingga pembangunan fisik belum dapat terlaksana.

- h. Keterpaduan Rencana dan ketersediaan data Belum optimalnya keterpaduan rencana karena permasalahan koordinasi, keterbatasan SDM, pemanfaatan anggaran diiringi dengan perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi terkait air minum dan sanitasi
- i. Kualitas bangunan Gedung dan rumah negara Banyaknya Bangunan Gedung pemerintah yang belum memiliki persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- j. Penanganan Revitalisasi Kawasan Tidak dilanjutkannya RTBL menjadi Perbup/ Perwali, banyaknya kawasan di kabupaten/kota yang belum mempunyai peraturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ Kawasan
- k. Ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas, belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan Gedung



negara dan rumah negara disamping itu belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi

- l. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Timur
- m. Percepatan penyusunan peraturan tentang pedoman operasionalisasi Perda RTRW Provinsi
- n. Peningkatan Peran forum penataan ruang provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Timur
- o. Optimalisasi terhadap integrasi urusan pertanahan dengan urusan penataan ruang Provinsi e. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- p. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dalam mendukung percepatan perwujudan pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan
- q. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang berbasis aplikasi secara interaktif dalam mendukung aksesibilitas informasi tata ruang di seluruh lapisan Masyarakat
- r. Pengawasan dan pengendalian terhadap perwujudan pemanfaatan ruang antara wilayah darat dan laut Jawa Timur
- s. Kebijakan pembagian kewenangan urusan pertanahan serta integrasi pertanahan dengan penataan ruang yang belum efektif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- t. Adanya permohonan fasilitasi kasus pertanahan perlu Upaya komprehensif dari Pemerintah pusat maupun daerah terutama terkait status kepemilikan tanah, ahli waris, dan ganti rugi tanah warga

**b. Isu Percepatan Penerapan SPM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan ( Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari persentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada msyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta

mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.

- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

### **c. Isu Kesetaraan Gender**

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 39 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok disabilitas, kelompok lansia dan kelompok –kelompok lainnya. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan responsive gender dalam pembangunan Jawa Timur diantaranya:

1. Perencanaan dalam bangunan Gedung terdapat ruang laktasi, pemisahan area utilitas (Kamar mandi/WC) antara laki-laki dan perempuan, KM/WC kaum difable yang didesain khusus, tempat parkir untuk perempuan dan difable yang lebih dekat dengan entrance, ramp dan railing, tempat bermain anak-anak, akan tetapi tidak semua Gedung menerapkan hal tersebut.
2. Partisipasi kaum perempuan baik dari segi penerima manfaat dan pelaku dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti KOTAKU (penanganan Kawasan kumuh), Pamsimas dan Sanimas/ Sandes, TPS3R.
3. Pembangunan penyediaan sarpras air bersih seperti pipanisasi dari sumber air ke rumah penduduk untuk mempermudah jangkauan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, sanitasi (drainase, persampahan, air limbah domestik, MCK) untuk kemudahan jangkauan akses utilitas dan jalan lingkungan yang mempermudah mobilisasi dalam melakukan kegiatan/ aktivitas.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugrah

Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2021 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender
3. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
4. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim
5. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
6. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

**d. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 tahun 2019**

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan.

Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, gambaran pembangunan yang di harapkan terjadi adalah untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum Keciptakarya-an-Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Peningkatan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan

#### **f. Isu Strategis Penerapan Perpu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Pada Tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Perpu No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan Perpu Cipta Kerja, yang ditetapkan sebagai pengganti dari UU Cipta Kerja, Perpu tersebut mengubah beberapa peraturan sebelumnya diantaranya:

- UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi

- UU No 9/2015 Tentang Perubahan ke-2 atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No 26/2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 28/2022 Tentang Bangunan Gedung
- UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun tujuan besar diberlakukannya Perpu No 6 Tahun 2023 (Perpu Cipta Kerja) adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional
4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.
5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perpu Cipta Kerja menagtur mengenai kebijakan strategis yang meliputi :
  - a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
  - b. Ketenaga kerjaan
  - c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
  - d. Kemudahan berusaha

- e. Dukungan riset dan inovasi
- f. Pengadaan tanah
- g. Kawasan ekonomi
- h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
- j. Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Perpu ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka Perpu Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

1. Perijinan berbasis RDTR
2. Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang
3. Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UUCK dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Perubahan perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
6. Kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terhadap KSP dan KSK dihapus, termasuk RTR KSP dan KSK dihapus dari nomenklatur rencana rinci tata ruang;



7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub
10. Pertimbangan Pertimbangan KSP dan KSK terhadap RTRW Prop dan RTRW Kab/Kota dihapus;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85,05 Poin	53.516.668.000,00	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85,05 Poin	53.516.668.000,00
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	90,05 Persen		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	90,05 Persen	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90,63 persen		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90,63 persen	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8 Dokumen	73.000.000,00	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8 Dokumen	73.000.000,00
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.927.000.000,00	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.927.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.03.01. 1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.000.000,00	1.03.01.1 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.000.000,00
	1.03.01. 1.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00	1.03.01.1 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00
	1.03.01. 1.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	1.03.01.1 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
	1.03.01. 1.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	1.03.01.1 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
	1.03.01. 1.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00	1.03.01.1 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00
	1.03.01. 1.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Laporan	1.907.000.000,00	1.03.01.1 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	1.907.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
			Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	1.03.01. 1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000,00	1.03.01.1 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000,00
	<b>1.03.01. 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>36.465.000.000,00</b>	<b>1.03.01. 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>36.465.000.000,00</b>
	1.03.01. 1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	176 Orang/ Bulan	33.944.264.000,00	1.03.01.1 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	176 Orang/ Bulan	33.944.264.000,00
	1.03.01. 1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.579.000.000,00	1.03.01.1 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.579.000.000,00
	1.03.01. 1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.000.000,00	1.03.01.1 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.000.000,00
	1.03.01. 1.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	170.000.000,00	1.03.01.1 .02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	170.000.000,00
	1.03.01. 1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	170.000.000,00	1.03.01.1 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	170.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.03.01. 1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.000.000,00	1.03.01.1 .02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.000.000,00
	1.03.01. 1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	199.736.000,00	1.03.01.1 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	199.736.000,00
	1.03.01. 1.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	1.03.01.1 .02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00
	<b>1.03.01. 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.03.01. 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>11.000.000,00</b>
	1.03.01. 1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	1.03.01.1 .03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
	1.03.01. 1.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	1.03.01.1 .03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000,00
	1.03.01. 1.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	1.03.01.1 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00
	1.03.01. 1.03.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1 Laporan	2.000.000,00	1.03.01.1 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	2.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	6		Milik Daerah pada SKPD				pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD		
	<b>1.03.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>1.03.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>35.000.000,00</b>
	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	35.000.000,00	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	35.000.000,00
	<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1.650.000.000,00</b>	<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1.650.000.000,00</b>
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	500.000.000,00	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	500.000.000,00
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.000.000,00	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.000.000,00
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000.000,00	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000.000,00
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000.000,00	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000.000,00
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	120.000.000,00	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	120.000.000,00
	<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>2.546.000.000,00</b>	<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>2.546.000.000,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
			<b>dan jasa</b>					<b>dan jasa</b>		
	1.03.01. 1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	1.03.01.1 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	1.03.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	1.03.01.1 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	1.03.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	1.03.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	1.03.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	1.000.000.000,00	1.03.01.1 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	1.000.000.000,00
	1.03.01. 1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.03.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000,00
	1.03.01. 1.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	9.000.000,00	1.03.01.1 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	9.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	<b>1.03.01. 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>11 Laporan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.03.01. 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>11 Laporan</b>	<b>25.000.000,00</b>
	1.03.01. 1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	1.03.01.1 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00
	<b>1.03.01. 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>10.005.500.000,00</b>	<b>1.03.01. 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>10.005.500.000,00</b>
	1.03.01. 1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000,00	1.03.01.1 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000,00
	1.03.01. 1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.03.01.1 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000,00
	1.03.01. 1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000.000,00	1.03.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000.000,00
	<b>1.03.01. 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>779.168.000,00</b>	<b>1.03.01. 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>779.168.000,00</b>
	1.03.01. 1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	368.168.000,00	1.03.01.1 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	368.168.000,00



NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.03.01. 1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	120.000.000,00	1.03.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	120.000.000,00
	1.03.01. 1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.000.000,00	1.03.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.000.000,00
	1.03.01. 1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	1.03.01.1 .09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00
<b>2</b>	<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak</b>	<b>100 Persen</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak</b>	<b>100 Persen</b>	<b>80.000.000.000,00</b>
	<b>1.03.03. 1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT yang terlayani akses air minum</b>	<b>2400 RT</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>1.03.03. 1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT yang terlayani akses air minum</b>	<b>2400 RT</b>	<b>80.000.000.000,00</b>
	1.03.03. 1.01.001 5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	4.000.000.000,00	1.03.03.1 .01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	4.000.000.000,00
	1.03.03. 1.01.001 6	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	150 Orang	200.000.000,00	1.03.03.1 .01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan	150 Orang	200.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		(SPAM)	Penyediaan Air Minum (SPAM)				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	20 Liter/Detik	75.800.000.000,00	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	20 Liter/Detik	75.800.000.000,00
3	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan</b>	<b>26.35 Persen</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan</b>	<b>26.35 Persen</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
	1.03.04.1.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan</b>	<b>4 Sistem</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.03.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan</b>	<b>4 Sistem</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	11 Kabupaten/Kota	300.000.000,00	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	11 Kabupaten/Kota	300.000.000,00
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	0,50 Ton/hari	850.000.000,00	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	0,50 Ton/hari	850.000.000,00
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	100.000.000,00	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	100.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.03.04. 1.01.001 6	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	750.000.000,00	1.03.04.1 .01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	750.000.000,00
<b>4</b>	<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak</b>	<b>97,5 Persen</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak</b>	<b>97,5 Persen</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
	<b>1.03.05. 1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah</b>	<b>500 Jiwa</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.03.05. 1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah</b>	<b>500 Jiwa</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
	1.03.05. 1.01.001 3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	15 M <sup>3</sup> /Hari	850.000.000,00	1.03.05.1 .01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	15 M <sup>3</sup> /Hari	850.000.000,00
	1.03.05. 1.01.001 4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	150.000.000,00	1.03.05.1 .01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	150.000.000,00
	1.03.05. 1.01.001 5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,000	1.03.05.1 .01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,000
<b>5</b>	<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>9,35 Persen</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>9,35 Persen</b>	<b>1.500.000.000,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1.000 Meter	1.500.000.000,00	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1.000 Meter	1.500.000.000,00
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00
6	1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman</b>	<b>100,00 Persen</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman</b>	<b>100,00 Persen</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah rumah tangga yang terlayani infrastruktur permukiman	500 RT	10.000.000.000,00	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah rumah tangga yang terlayani infrastruktur permukiman	500 RT	10.000.000.000,00
	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0,012 ton/hari	500.000.000,00	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0,012 ton/hari	500.000.000,00
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 liter/detik	9.000.000.000,00	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 liter/detik	9.000.000.000,00
	1.03.07.1.01.0033	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	15 m3/hari	500.000.000,00	1.03.07.1.01.0033	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	15 m3/hari	500.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
7	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>100 Persen</b>	<b>137.540.000.000,00</b>	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>100 Persen</b>	<b>137.540.000.000,00</b>
	1.03.08.1.01	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi</b>	<b>8 Gedung</b>	<b>137.540.000.000,00</b>	1.03.08.1.01	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi</b>	<b>8 Gedung</b>	<b>137.540.000.000,00</b>
	1.03.08.6.01.001.2	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	220 Orang	710.000.000,00	1.03.08.6.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	220 Orang	710.000.000,00
	1.03.08.1.01.001.3	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	15 Rumah Negara	358.000.000,00	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	15 Rumah Negara	358.000.000,00
	1.03.08.1.01.001.4	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	600.000.000,00	1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	600.000.000,00
	1.03.08.1.01.001.6	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	33.816.000.000,00	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	33.816.000.000,00
	1.03.08.1.01.001.9	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	7 Dokumen	102.056.000.000,00	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	7 Dokumen	102.056.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
8	1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>36,4 Persen</b>	<b>790.000.000,00</b>	1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>36,4 Persen</b>	<b>790.000.000,00</b>
	1.03.09.1.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>1 Kawasan</b>	<b>790.000.000,00</b>	1.03.09.1.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>1 Kawasan</b>	<b>790.000.000,00</b>
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	770.000.000,00	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	770.000.000,00
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen	20.000.000,00	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen	20.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
9	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.342.000.000,00</b>	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.342.000.000,00</b>
	1.03.11.1.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>230 Orang</b>	<b>1.180.000.000,00</b>	1.03.11.1.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>230 Orang</b>	<b>1.180.000.000,00</b>
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	180 Orang	297.018.750,00	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	180 Orang	297.018.750,00
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	882.981.250,00	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	882.981.250,00
	1.03.11.1.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>100 Orang</b>	<b>162.000.000,00</b>	1.03.11.1.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>100 Orang</b>	<b>162.000.000,00</b>
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	3 Layanan Informasi	100.000.000,00	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	3 Layanan Informasi	100.000.000,00
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	5 Dokumen	50.000.000,00	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	5 Dokumen	50.000.000,00
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	12.000.000,00	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	12.000.000,00
10	1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi</b>	<b>82,5 Poin</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi</b>	<b>82,5 Poin</b>	<b>4.900.000.000,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		<b>PENATAAN RUANG</b>	<b>Tata Ruang</b>				<b>PENATAAN RUANG</b>	<b>Tata Ruang</b>		
	<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>295.000.000,00</b>	<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>295.000.000,00</b>
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang	295.000.000,00	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang	295.000.000,00
	<b>1.03.12.1.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan</b>	<b>20 Kegiatan</b>	<b>1.055.000.000,00</b>	<b>1.03.12.1.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan</b>	<b>20 Kegiatan</b>	<b>1.055.000.000,00</b>
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	10 Laporan	850.000.000,00	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	10 Laporan	850.000.000,00
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	10 Berita Acara	205.000.000,00	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	10 Berita Acara	205.000.000,00
	<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1.850.000.000,00</b>	<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1.850.000.000,00</b>
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Laporan	750.000.000,00	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Laporan	750.000.000,00
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan	1 Dokumen	700.000.000,00	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan	1 Dokumen	700.000.000,00



NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
			ruang					ruang		
	1.03.12. 1.03.000 7	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	400.000.000,00	1.03.12.1 .03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	400.000.000,00
	<b>1.03.12. 1.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	<b>1.03.12. 1.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1.700.000.000,00</b>
	1.03.12. 1.04.000 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	1.700.000.000,00	1.03.12.1 .04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	1.700.000.000,00
<b>11</b>	<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>370.000.000,00</b>
	<b>2.10.03. 1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>2.10.03. 1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>370.000.000,00</b>
	2.10.03. 1.01.000 5	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	10 Dokumen	370.000.000,00	2.10.03.1 .01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	10 Dokumen	370.000.000,00
<b>12</b>	<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>80.000.000,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	1 kasus	80.000.000,00	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	1 kasus	80.000.000,00
	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	80.000.000,00	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	80.000.000,00
13	2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>100 Persen</b>	<b>650.000.000,00</b>	2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>100 Persen</b>	<b>650.000.000,00</b>
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	3 dokumen	650.000.000,00	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	3 dokumen	650.000.000,00
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	650.000.000,00	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	650.000.000,00
14	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur</b>	<b>8 Persen</b>	<b>661.920.000,00</b>	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur</b>	<b>8 Persen</b>	<b>661.920.000,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6 Dokumen	661.920.000,00	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6 Dokumen	661.920.000,00
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	220.640.000,00	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	220.640.000,00
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	220.640.000,00	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	220.640.000,00
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	2 Dokumen	220.640.000,00	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	2 Dokumen	220.640.000,00
15	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>12,8 persen</b>	<b>76.900.382.000,00</b>	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>12,8 persen</b>	<b>76.900.382.000,00</b>
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	36,57 persen	1.193.000.000,00	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	36,57 persen	1.193.000.000,00
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/	1 Dokumen	500.000.000,00	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/	1 Dokumen	500.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
			Terlegalisasi					Terlegalisasi		
	1.04.03. 1.01.001 1	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	1.04.03.1 .01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	100.000.000,00
	1.04.03. 1.01.001 7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	593.000.000,00	1.04.03.1 .01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	593.000.000,00
	<b>1.04.03. 1.02</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	<b>10 Ha</b>	<b>75.707.382.000,00</b>	<b>1.04.03. 1.02</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	<b>10 Ha</b>	<b>75.707.382.000,00</b>
	1.04.03. 1.02.001 2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	50.207.382.000,00	1.04.03.1 .02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	50.207.382.000,00
	1.04.03. 1.02.001 3	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	10 Hektar	25.500.000.000,00	1.04.03.1 .02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	10 Hektar	25.500.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		Belas Ha	(Lima Belas) Ha yang Diremajakan				dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	(Lima Belas) Ha yang Diremajakan		
16	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>25 Persen</b>	<b>2.045.080.000,00</b>	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>25 Persen</b>	<b>2.045.080.000,00</b>
	1.04.05.1.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU</b>	<b>26 Kawasan</b>	<b>2.045.080.000,00</b>	1.04.05.1.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU</b>	<b>26 Kawasan</b>	<b>2.045.080.000,00</b>
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	9 Dokumen	135.766.400,00	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	9 Dokumen	135.766.400,00
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	26 Lokasi	1.735.313.600,00	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	26 Lokasi	1.735.313.600,00
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	174.000.000,00	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	174.000.000,00
17	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.202.386.587,00</b>	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.202.386.587,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	973 Unit	6.202.386.587,00	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	973 Unit	6.202.386.587,00
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	6.202.386.587,00	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	6.202.386.587,00
18	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan</b>	<b>83,5 Poin</b>	<b>531.564.393,00</b>	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan</b>	<b>83,5 Poin</b>	<b>531.564.393,00</b>
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	100 Persen	531.564.393,00	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	100 Persen	531.564.393,00
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	9 Perangkat Pendukung	531.564.393,00	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	9 Perangkat Pendukung	531.564.393,00
19	1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>85,05 Poin</b>	<b>1.266.049.020,00</b>	1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>85,05 Poin</b>	<b>1.266.049.020,00</b>
	1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>90,05 persen</b>		1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>90,05 persen</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>	<b>90,63 persen</b>		<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>	<b>90,63 persen</b>	
	<b>1.04.01. 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>95.412.000,00</b>	<b>1.04.01. 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>95.412.000,00</b>
	1.04.01. 1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.412.000,00	1.04.01.1 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.412.000,00
	<b>1.04.01. 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>767.089.100,00</b>	<b>1.04.01. 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>767.089.100,00</b>
	1.04.01. 1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.424.000,00	1.04.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.424.000,00
	1.04.01. 1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.856.600,00	1.04.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.856.600,00
	1.04.01. 1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.188.500,00	1.04.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.188.500,00
	1.04.01. 1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.590.000,00	1.04.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.590.000,00
	1.04.01. 1.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	1.04.01.1 .06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00
	1.04.01. 1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	556.030.000,00	1.04.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	556.030.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD		
	<b>1.04.01. 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>11 Laporan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.04.01. 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>11 Laporan</b>	<b>20.000.000,00</b>
	1.04.01. 1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	1.04.01.1 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
	<b>1.04.01. 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>297.087.920,00</b>	<b>1.04.01. 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>297.087.920,00</b>
	1.04.01. 1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	1.04.01.1 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00
	1.04.01. 1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	292.087.920,00	1.04.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	292.087.920,00
	<b>1.04.01. 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>86.460.000,00</b>	<b>1.04.01. 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>86.460.000,00</b>
	1.04.01. 1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.600.000,00	1.04.01.1 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.600.000,00
	1.04.01. 1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	27.860.000,00	1.04.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	27.860.000,00



NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
	1.04.01. 1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	1.04.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00
					<b>486.827.211.059,00</b>					<b>486.827.211.059,00</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain usulan yang berasal dari kabupaten/kota. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta karya juga mendukung pokok-pokok pikiran dewan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak, mengingat masih tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur yang masih mengkonsumsi air minum yang tidak layak serta banyaknya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur keciptaan karya dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum dimasing-masing Kabupaten/Kota maupun lintas wilayah(regional). Pengentasan daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.

4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan Sanitasi yang layak, mengingat masih banyaknya penduduk di Jawa Timur yang ber sanitasi yang tidak layak maka diperlukan kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan sanitasi dan persampahan. Hal ini menjadi peluang pembangunan agar target pelayanan infrastruktur keciptaan karya dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sanitasi dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan dan pembangunan yang masif dan masal yang langsung menyentuh masyarakat seperti MCK Komunal, pembangunan saluran drainase rumah tangga, drainase lingkungan, IPLT serta TPS3R dengan skala kawasan.
5. Pengentasan kawasan kumuh melalui keterpaduan program dan kegiatan. Pengentasan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan oleh satu program atau satu pihak saja. Pengentasan kawasan kumuh harus dilakukan melalui keterpaduan program dan kegiatan dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat di kawasan tersebut. Sehingga dalam satu kawasan kumuh ada intervensi pembangunan Air bersih, pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sanitasi, RTLH serta persampahan. Tujuh indikator kumuh yang menjadi tolak ukur yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau harus disentuh dan ditangani sehingga dengan keterpaduan pembangunan tersebut, kawasan kumuh akan berkurang, tuntas dan tidak akan kembali menjadi kawasan kumuh.
6. Perlunya peningkatan kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah dan Swasta dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa Timur sehingga dapat memungkinkan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Selain itu perlunya peningkatan penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti perumahan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan perumahan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dapat menjadi potensi yang dapat dikerjasamakan dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan dunia usaha.

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal (diutamakan dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh)	Bappeda Kab.Malang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab.Pacitan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab.Magetan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab.Magetan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Magetan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Magetan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Pasuruan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Kediri	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Pasuruan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Mojokerto	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Nganjuk	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Nganjuk	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Kediri	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Kediri	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Kediri	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Mojokerto	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Mojokerto	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kota Probolinggo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Pacitan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Pacitan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	



NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Pacitan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Pacitan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Jombang	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Jombang	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Ngawi	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal (diutamakan dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh)	Bappeda Kab. Ngawi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	Tidak direkomendasikan berdasarkan hasil musrenbang karena permohonan terkait penggunaan pada Limbah home industri bukan limbah rumah tangga/domestik
	#BP Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Ngawi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Ngawi	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Mojokerto	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kota Probolinggo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kota Mojokerto	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Lumajang	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Lumajang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kota Pasuruan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal (diutamakan dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh)	Bappeda Kab. Banyuwangi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Lumajang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Lumajang	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Lumajang	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sampang	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sampang	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Probolinggo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Probolinggo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Probolinggo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Probolinggo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Pamekasan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Pamekasan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	



NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sampang	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Sampang	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Bondowoso	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Bondowoso	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Bondowoso	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Ponorogo	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Ponorogo	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Sidoarjo	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sidoarjo	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sidoarjo	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sidoarjo	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Sidoarjo	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	Bappeda Kab. Sidoarjo	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	

NO	USULAN	PENGUSUL	SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	#BP Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal (diutamakan dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh)	Bappeda Kab. Lamongan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Lamongan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai Kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	Bappeda Kab. Sumenep	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Verifikasi TAPD	
	#BP Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	Bappeda Kab. Sumenep	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Verifikasi TAPD	
	#BP Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK Rawan Air Gubernur/Bupati/ Walikota)	Bappeda Kab. Blitar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Verifikasi TAPD	

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2025

NO.	USULAN/PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH USULAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DI PROSES
1	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	297	Proses Verifikasi TAPD	
2	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	36	Proses Verifikasi TAPD	
3	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	14	Proses Verifikasi TAPD	
4	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	12	Proses Verifikasi TAPD	
5	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5	Proses Verifikasi TAPD	
6	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	3	Proses Verifikasi TAPD	
7	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani (tanaman pangan atau horti), Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani (sesuai Permendes 1 2015),	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2	Proses Verifikasi TAPD	

NO.	USULAN/PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH USULAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DI PROSES
8	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	Proses Verifikasi TAPD	
	<b>TOTAL</b>		<b>370</b>		

# BAB 3

## TUJUAN DAN SASARAN

---

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025 adalah **Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas Pembangunan yang meliputi sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan Pendidikan dan Kesehatan, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Pada bidang infrastruktur, kualitas infrastruktur diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

1. Pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada Kawasan afirmasi 3T
2. Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan seperti Kawasan strategis perkotaan, Kawasan industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, Kawasan strategis pariwisata, dan Kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada pengembangan multi infrastruktur dan maritime backbone dan global/major port yang mumpuni guna menurunkan logistic dan production cost dan meningkatkan daya saing industri di Jawa.

Selain itu, industri di Jawa perlu kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan

4. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;
5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis

Keterkaitan dan kesesuaian Kebijakan dan sasaran Nasional tahun 2025 dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Kerja 2025 dalam percepatan pembangunan serta pengurangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah tercapainya peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui program penyediaan sanitasi dan air minum serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi Kawasan kumuh dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPD 2025-2026 dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, yaitu:

Tabel 6. Dukungan Dinas pada Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum layak	Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional
			Memfasilitasi sarana prasarana pengelolaan dan pengembangan persampahan, air limbah dan drainase regional
		Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman	Meningkatkan penanganan Kawasan kumuh permukiman kewenangan provinsi
		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana bangunan rumah dan lingkungan yang layak huni	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana provinsi
			Meningkatkan pengembangan PSU kawasan perumahan baik swadaya maupun komersil
		Peningkatan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatkan pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara sesuai NSPK	Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan negara melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, bantuan teknis, identifikasi, penetapan dan pengelolaan sesuai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			standar
		optimalisasi penanganan revitalisasi kawasan	Mengoptimalkan penanganan revitalisasi kawasan dengan penyusunan rencana kebijakan, supervisi dan monitoring RTBL Kabupaten/kota sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan
		Peningkatan kualitas tenaga ahli konstruksi, kapasitas sistem SIPJAKI serta pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi	Melaksanakan pelatihan/ pembinaan tenaga ahli dan kelembagaan konstruksi
			Meningkatkan pelayanan media informasi jasa konstruksi
			Mengoptimalkan peningkatan pelatihan kapasitas administrator SIPJAKI
			Mengoptimalkan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi disertai dengan peningkatan SDM
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang serta penetapan RTRW dan RTR sesuai pedoman
	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan	Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pengidentifikasian, inventarisasi data pertanahan dan mediasi sengketa tanah

Target tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	90,16%
	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan	Presentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	80%
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,45%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana tata ruang	91%

### 3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

#### 1. Permasalahan dan Isu strategis

Permasalahan yang menjadi prioritas utama penanganan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah **belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan dasar publik dan konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah,** dengan isu strategis **Pembangunan berkelanjutan.** Permasalahan ini memiliki dampak serius terhadap perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi manfaat pembangunan secara keseluruhan. Ditambah lagi masih adanya disparitas antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang belum merata baik infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air maupun transportasi sehingga terjadi ketimpangan daya saing dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kedua wilayah tersebut.

Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari sisi kualitas dan pemerataan antara lain untuk infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air maupun transportasi dan penataan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta responsif terhadap bencana dan krisis iklim sehingga dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung menurun seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan.

## **2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan pada RPD Tahun 2025-2026, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ikut serta dalam mewujudkan **tujuan pertama**, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- a) Meningkatnya nilai tambah ekonomi; (kalimat kinerja)
- b) Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan sumber daya air;
- c) Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat, laut dan udara.
- d) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Penyelesaian permasalahan tersebut diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah, sehingga sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Kerja Tahun 2025

adalah melaksanakan tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu :

1. Urusan Perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera social dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman serta pemenuhan kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap Rencana Tata Ruang di Jawa Timur.
3. Urusan pertanahan melalui program pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan serta penatagunaan tanah.

**Tabel 8. Sinkronisasi permasalahan, isu strategis, dan Tujuan di RPD 2025-2026**

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	Belum meratanya sarpras pelayanan dasar public serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar public pendukung pertumbuhan wilayah	Mewujudkan pemerataan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	<p>Urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :</p> <p>a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman</p> <p>b) Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</p> <p>c) Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana</p> <p>d) Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman</p> <p>e) hanya tersedianya 5 rusunawa dengan kurang optimalnya dalam hal pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani</li> <li>- Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau</li> <li>- Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan</li> <li>- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>- Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</li> <li>- minimal perumahan yang memiliki 50 rumah</li> <li>- Pernyaratan pelaksanaan fasilitasi PSU adalah perumahan yang memiliki minimal 50 rumah</li> <li>- masih banyak perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tetang SPM</li> <li>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</li> <li>- Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkaran wilayah</li> <li>- Permendagri no 67 tahun 2011,Perda no 9 tahun 2019, Pergub Jawa Timur no 63</li> </ul>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BNPB</li> <li>- (tambahkan penghambat penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana)</li> <li>- Rehab dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dengan syarat yang menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima</li> <li>- rendahnya kesadaran atas hak dan kewajiban penghuni Rusunawa karena latar belakang penghuni rusunawa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat umum, MBR, pekerja, pengungsi dan hasil Resettlement (permukiman kembali/ pengusuran) dengan berbagai karakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender</li> <li>- Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan</li> <li>- Dukungan Pergub Jawa Timur nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan rumah susun sederhana sewa pemerintah provinsi Jawa Timur</li> </ul>
2	Belum meratanya sarpras pelayanan dasar public serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar public pendukung pertumbuhan wilayah	Mewujudkan pemerataan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	<p>Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ruang meliputi:</p> <p>a) Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak dan aman)</p> <p>b) Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional</li> <li>- Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya data dari BNPB terkait SK daerah rawan air/ kekeringan</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun</li> </ul>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				<p>c) Cakupan pelayanan akses sanitasi layak dan aman yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak dan aman)</p> <p>d) belum tersedianya sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota</p> <p>e) Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang</p> <p>f) Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>g) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</p> <p>h) Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</p>	<p>RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang</p> <p>- UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya menyebabkan munculnya kendala baru dalam proses penyusunan, mekanisme evaluasi teknis dan proses penetapan RTR</p> <p>- Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR</p> <p>- Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021</p> <p>- Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan</p> <p>- Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait</p>	<p>2019 tentang SPM</p> <p>- Perpres 80 tahun 2019 terkait kegiatan prioritas SPAM Regional</p> <p>- Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua</p> <p>- Dukungan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN Nomor 11, 13, 15 sebagai turunan PP Nomor 21 Tahun 2021</p> <p>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</p> <p>- Pembinaan Teknis dapat dilakukan melalui Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, FGD, dan workshop</p> <p>- Dukungan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan</p>



No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				i) Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan j) belum optimalnya dalam memberikan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi k) Masih minimnya informasi tentang teknologi bahan bangunan l) Belum Optimalnya informasi SIPJAKI	pengendalian pemanfaatan ruang - Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal - Sudah beralihnya Izin Pemanfaatan Ruang menjadi KKPR sehingga perlu penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang kembali. - Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi - Menurunnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara - Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas - Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan (masih dalam dokume RTBL) - Banyak kawasan di kab/kota yang belum mempunyai peraturan RTBL sebagai salah satu andan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan	Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. - Dukungan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Permen PUPR no 21/PRT/M/2019 tentang SMK

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>untuk pemanfaatan ruang, penataan bangunan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan gedung negara</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan informasi di bidang teknologi bangunan</li> <li>- Belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi</li> </ul>	

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
3	Belum meratanya sarpras pelayanan dasar public serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar public pendukung pertumbuhan wilayah	Mewujudkan pemerataan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	<p>Urusan pertanahan meliputi :</p> <p>a) Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan</p> <p>b) koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain</p> <p>c) Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijin lokasi di Lintas Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal</li> <li>- Hamparan tanah di lintas Kabupaten/Kota belum termanfaatkan dengan benar</li> <li>- Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal</li> <li>- Belum adanya sosialisasi mendetail terkait pembagian urusan pertanahan antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.</li> <li>- Belum adanya pedoman maupun panduan pelaksanaan urusan pertanahan secara menyeluruh untuk Pemerintah Daerah.</li> <li>- Belum adanya sinkronisasi kegiatan pertanahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</li> <li>- Belum semua OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi terkait urusan pertanahan.</li> <li>- Belum selarasnya OPD yang membidangi urusan pertanahan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 14 ayat 4 bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib dan pada Pasal 18 ayat 4 terdapat arahan bahwa urusan pertanahan serumpun dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.</li> <li>- Adanya arahan dari RPJMN 2020-2024 bahwa urusan pertanahan terutama terkait sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi.</li> <li>- Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan dan saling terintegrasi.</li> <li>- Dukungan Peraturan</li> </ul>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>Kabupaten/Kota, karena ada yang urusannya dilaksanakan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maupun Sekretariat Daerah. Selain itu, juga banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membagi urusan pertanahan antara dinas teknis dengan dan Sekretariat Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sumber daya yang membidangi urusan pertanahan baik di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>- Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain maupun Kanwil/Kantah BPN.</li> <li>- Masih belum sepenuhnya aktif pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan reforma agrarian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pertanahan yaitu PP 18/2021, PP 19/2021, PP 20/2021, dan PP 43/2021.</li> </ul>

## **2. Pencapaian SDG's**

Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDG's) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur antara lain tujuan 6 : memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Tujuan 11: membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan melalui program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman dan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.

## **3. Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)**

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sedangkan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

## **4. Pengentasan Kemiskinan**

Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum regional yang berfokus pada daerah rawan air/ desa rawan kekeringan berperan dalam mengurangi kantong kemiskinan dan pemenuhan air minum layak. Kebutuhan masyarakat akan sanitasi layak, pengelolaan air limbah domestik dan persampahan didukung pembangunan sarana dan prasarana melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, persampahan regional serta sistem drainase. Penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Timur sehingga dapat memungkinkan penyediaan

rumah layak huni dengan harga terjangkau. Selain itu perlunya peningkatan penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) maupun kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dalam hal ini didukung oleh Program kawasan permukiman untuk penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program pemerintah dengan menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.

### 3.3.2 Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Terdapat 16 Program yang mencakup 29 kegiatan dan 88 Sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 antara lain

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah,
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
  - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi,
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang,
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi,

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi,
- c. Program Penatagunaan Tanah
  - Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- e. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  - Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota,
- g. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
- j. Program Pengembangan Permukiman
  - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi,
- k. Program Kawasan Permukiman
  - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
- l. Program Pengembangan Perumahan

- o Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- m. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - o Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- n. Program Penataan Bangunan Gedung
  - o Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi,
- o. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
  - o Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota,
- p. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - o Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi,
  - o Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada pada daerah di Jawa Timur dengan kewenangan Provinsi berupa wilayah regional (antara Kab/Kota) dan terfokus pada daerah rawan air/kawasan kekeringan serta dalam upaya penanganan pengurangan kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 10-15 Ha dan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Total Kebutuhan dana/ pagu indikatif bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. 486.827.211.059,00.

### 3.3.3 Penjelasan Rumusan Program

Rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik dari jenis program/kegiatan, pagu indikatif dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur.

### 3.3.4 Penjelasan tabel rencana program Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:





**Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	Jawa Timur	85,05	53.516.668.000,00	APBD		85,05	45.487.876.109,00
		<b>Persentase realisasi anggaran</b>		90,05 persen				90,05 persen	
		<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>		90,63 persen				90,63 persen	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	8 dokumen	2.000.000.000,00	APBD		8 dokumen	2.000.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah		4 dokumen				4 dokumen	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	8 Dokumen	25.000.000,00	APBD		8 Dokumen	25.000.000,00
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	9.000.000,00	APBD		1 Dokumen	9.000.000,00
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	9.000.000,00	APBD		1 Dokumen	9.000.000,00
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur	5 Laporan	1.907.000.000,00	APBD		5 Laporan	1.907.000.000,00
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	4 Laporan	20.000.000,00	APBD		4 Laporan	20.000.000,00
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	12 Laporan	36.465.000.000,00	APBD		12 Laporan	36.465.000.000,00
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	176 Orang/ Bulan	33.944.264.000,00	APBD		176 Orang/ Bulan	33.944.264.000,00
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12 Dokumen	1.579.000.000,00	APBD		12 Dokumen	1.579.000.000,00
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	400.000.000,00	APBD		12 Dokumen	400.000.000,00
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	170.000.000,00	APBD		12 Dokumen	170.000.000,00
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	2 Laporan	170.000.000,00	APBD		2 Laporan	170.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Timur	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.000.000,00
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	12 Laporan	199.736.000,00	APBD		12 Laporan	199.736.000,00
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.000.000,00
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	11.000.000,00	APBD		12 Laporan	11.000.000,00
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	2.000.000,00	APBD		1 Dokumen	2.000.000,00
1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	2.000.000,00	APBD		1 Laporan	2.000.000,00
1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	4 Laporan	5.000.000,00	APBD		4 Laporan	5.000.000,00
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	2.000.000,00	APBD		1 Laporan	2.000.000,00
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jawa Timur	12 Dokumen	35.000.000,00	APBD		12 Dokumen	35.000.000,00
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	35.000.000,00	APBD		12 Laporan	35.000.000,00
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	3 Dokumen	1.650.000.000,00	APBD		3 Dokumen	1.650.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	12 Unit	500.000.000,00	APBD		12 Unit	500.000.000,00
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	12 Dokumen	15.000.000,00	APBD		12 Dokumen	15.000.000,00
1.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Timur	12 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD		12 Dokumen	1.000.000.000,00
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	12 Dokumen	15.000.000,00	APBD		12 Dokumen	15.000.000,00
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Timur	1 Orang	120.000.000,00	APBD		1 Orang	120.000.000,00
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Jawa Timur	11 Dokumen	2.546.000.000,00	APBD		11 Dokumen	2.546.000.000,00
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	30.000.000,00	APBD		1 Paket	30.000.000,00
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	7.000.000,00	APBD		1 Paket	7.000.000,00
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	150.000.000,00
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	150.000.000,00
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	150.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	40 Laporan	1.000.000.000,00	APBD		40 Laporan	1.000.000.000,00
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	1.000.000.000,00	APBD		1 Laporan	1.000.000.000,00
1.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	3 Dokumen	9.000.000,00	APBD		3 Dokumen	9.000.000,00
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	11 Laporan	25.000.000,00	APBD		11 Laporan	25.000.000,00
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	1 Unit	25.000.000,00	APBD		1 Unit	25.000.000,00
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	10.005.500.000,00	APBD		12 Laporan	10.005.500.000,00
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1 Laporan	5.500.000,00	APBD		1 Laporan	5.500.000,00
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Timur	12 Laporan	1.000.000.000,00	APBD		12 Laporan	1.000.000.000,00
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	9.000.000.000,00	APBD		1 Laporan	9.000.000.000,00
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Jawa Timur	12 Laporan	779.168.000,00	APBD		12 Laporan	779.168.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jawa Timur	30 Unit	368.168.000,00	APBD		30 Unit	368.168.000,00
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	8 Unit	120.000.000,00	APBD		8 Unit	120.000.000,00
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	261.000.000,00	APBD		1 Unit	261.000.000,00
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	30.000.000,00	APBD		1 Unit	30.000.000,00
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000.000,00</b>
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Jawa Timur	2400 RT	80.000.000.000,00	APBD		2400 RT	80.000.000.000,00
1.03.03.1.01.00 15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jawa Timur	2 Dokumen	4.000.000.000,00	APBD		2 Dokumen	4.000.000.000,00
1.03.03.1.01.00 16	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jawa Timur	150 Orang	200.000.000,00	APBD		150 Orang	200.000.000,00
1.03.03.1.01.00 17	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Jawa Timur	20 Liter/Detik	75.800.000.000,00	APBD		20 Liter/Detik	75.800.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/Kota								
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>26,35 %</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>28,65 %</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	Jawa Timur	4 Sistem	2.000.000.000,00	APBD		4 Sistem	2.000.000.000,00
1.03.04.1.01.00 12	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jawa Timur	11 Kabupaten/Ko ta	300.000.000,00	APBD		11 Kabupaten/Ko ta	300.000.000,00
1.03.04.1.01.00 13	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Jawa Timur	0,5 ton/hari	850.000.000,00	APBD		0,5 ton/hari	850.000.000,00
1.03.04.1.01.00 14	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jawa Timur	100 Orang	100.000.000,00	APBD		100 Orang	100.000.000,00
1.03.04.1.01.00 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Jawa Timur	3 Dokumen	750.000.000,00	APBD		3 Dokumen	750.000.000,00
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>97,5 %</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	Jawa Timur	500 Jiwa	1.500.000.000,00	APBD		500 Jiwa	1.500.000.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.05.1.01.00 13	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Jawa Timur	15 M <sup>3</sup> /Hari	850.000.000,00	APBD		15 M <sup>3</sup> /Hari	850.000.000,00
1.03.05.1.01.00 14	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jawa Timur	100 Orang	150.000.000,00	APBD		100 Orang	150.000.000,00
1.03.05.1.01.00 15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jawa Timur	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD		1 Dokumen	500.000.000,00
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>9,35 %</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>11,23 %</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	Jawa Timur	1000 Meter	1.500.000.000,00	APBD		1000 Meter	1.500.000.000,00
1.03.06.1.01.00 08	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jawa Timur	4 sistem drainase perkotaan	1.500.000.000,00	APBD		4 sistem drainase perkotaan	1.500.000.000,00
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah rumah tangga yang terlayani infrastruktur permukiman	Jawa Timur	1000 Meter	10.000.000.000,00	APBD		1000 Meter	10.000.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.07.1.01.00 07	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Jawa Timur	0.012 ton/hari	500.000.000,00	APBD		0.012 ton/hari	500.000.000,00
1.03.07.1.01.00 26	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Proviinsi	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Proviinsi yang dibangun	Jawa Timur	10 liter/detik	9.000.000.000,00	APBD		10 liter/detik	9.000.000.000,00
1.03.07.1.01.00 33	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Jawa Timur	15 m3/hari	500.000.000,00	APBD		15 m3/hari	500.000.000,00
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Presentase Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100 %</b>	<b>137.540.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>137.540.000.000,00</b>
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jawa Timur	8 Gedung	137.540.000.000,00	APBD		8 Gedung	137.540.000.000,00
1.03.08.6.01.00 12	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jawa Timur	220 Orang	710.000.000,00	APBD		220 Orang	710.000.000,00
1.03.08.6.01.00 13	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Jawa Timur	15 rumah negara	358.000.000,00	APBD		15 rumah negara	358.000.000,00
1.03.08.6.01.00 14	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Jawa Timur	1 bangunan Gedung cagar budaya	600.000.000,00	APBD		1 bangunan Gedung cagar budaya	600.000.000,00
1.03.08.6.01.00 16	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Jawa Timur	1 bangunan gedung	33.816.000.000,00	APBD		1 bangunan gedung	33.816.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.08.6.01.00 19	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jawa Timur	7 Dokumen	102.056.000.000,00	APBD		7 Dokumen	102.056.000.000,00
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>36,4 %</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>38,46 %</b>	<b>790.000.000,00</b>
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Jawa Timur	1 Kawasan	790.000.000,00	APBD		1 Kawasan	790.000.000,00
1.03.09.1.01.00 09	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jawa Timur	1 Dokumen	770.000.000,00	APBD		1 Dokumen	770.000.000,00
1.03.09.1.01.00 10	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Jawa Timur	2 Dokumen	20.000.000,00	APBD		2 Dokumen	20.000.000,00
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100%</b>	<b>1.342.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.342.000.000,00</b>
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	Jawa Timur	230	1.180.000.000,00	APBD		250	1.180.000.000,00
1.03.11.1.01.00 11	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Jawa Timur	180 Orang	297.018.750,00	APBD		200 Orang	297.018.750,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jawa Timur	50 Lembaga	882.981.250,00	APBD		50 Lembaga	882.981.250,00
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Jawa Timur	100 Orang	162.000.000,00	APBD		100 Orang	162.000.000,00
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Jawa Timur	3 Layanan Informasi	100.000.000,00	APBD		3 Layanan Informasi	100.000.000,00
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Jawa Timur	5 Dokumen	50.000.000,00			5 Dokumen	50.000.000,00
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jawa Timur	100 Orang	12.000.000,00	APBD		100 Orang	12.000.000,00
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>82,5</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>85</b>	<b>4.900.000.000,00</b>
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jawa Timur	100%	295.000.000,00	APBD		100%	295.000.000,00
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi ruang	Jawa Timur	200 Orang	295.000.000,00	APBD		200 Orang	295.000.000,00
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Jawa Timur	12 Kegiatan	1.055.000.000,00	APBD		12 Kegiatan	1.055.000.000,00
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Jawa Timur	10 Laporan	850.000.000,00	APBD		10 Laporan	850.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.1.02.00 11	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Jawa Timur	10 BA	205.000.000,00	APBD		10 BA	205.000.000,00
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Jawa Timur	2 Kegiatan	1.850.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	1.600.000.000,00
1.03.12.1.03.00 04	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jawa Timur	10 Laporan	750.000.000,00	APBD		10 Laporan	750.000.000,00
750.000.000,00	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jawa Timur	1 Dokumen	700.000.000,00	APBD		1 Dokumen	700.000.000,00
700.000.000,00	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jawa Timur	1 Dokumen	400.000.000,00	APBD		1 Dokumen	400.000.000,00
400.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Jawa Timur	37 Kegiatan	1.700.000.000,00	APBD		37 Kegiatan	1.700.000.000,00
1.03.12.1.04.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jawa Timur	1 Dokumen	1.700.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.700.000.000,00
<b>1</b>	<b>Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>								
<b>1.04</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>								
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>8%</b>	<b>661.920.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>8%</b>	<b>661.920.000,00</b>
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jawa Timur	6 Dokumen	661.920.000,00	APBD		6 Dokumen	661.920.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jawa Timur	2 Dokumen	220.640.000,00	APBD		2 Dokumen	220.640.000,00
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jawa Timur	2 Dokumen	220.640.000,00	APBD		2 Dokumen	220.640.000,00
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jawa Timur	2 Dokumen	220.640.000,00	APBD		2 Dokumen	220.640.000,00
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>12,18%</b>	<b>76.900.382.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>13%</b>	<b>76.900.382.000,00</b>
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jawa Timur	36,57%	1.193.000.000,00	APBD		36,57%	1.193.000.000,00
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Jawa Timur	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD		0	0,00
1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Jawa Timur	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	APBD		1 Sistem Informasi 3 Laporan	100.000.000,00
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jawa Timur	3 Laporan	593.000.000,00	APBD		1 Laporan	593.000.000,00
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jawa Timur	10 Ha	75.707.382.000,00	APBD		10 Ha	75.707.382.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>								
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100%</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>370.000.000,00</b>
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Jawa Timur	10 Dokumen	370.000.000,00	APBD		10 Dokumen	370.000.000,00
2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Jawa Timur	10 Dokumen	370.000.000,00	APBD		20 Dokumen	370.000.000,00
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000,00</b>
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Jawa Timur	1 kasus	80.000.000,00	APBD		20 kasus	80.000.000,00
2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	80.000.000,00	APBD		1 Dokumen	80.000.000,00
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100%</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>650.000.000,00</b>
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Jawa Timur	3 dokumen	650.000.000,00	APBD		3 dokumen	650.000.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jawa Timur	3 Laporan	650.000.000,00	APBD		3 Laporan	650.000.000,00
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>100 %</b>	<b>6.202.386.587,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>6.202.386.587,00</b>
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Jawa Timur	973 Unit	6.202.386.587,00	APBD		973 Unit	6.202.386.587,00
1.03.08.1.01.00 20	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jawa Timur	5 Bangunan Gedung	6.202.386.587,00	APBD		5 Bangunan Gedung	6.202.386.587,00
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>83,5</b>	<b>531.564.393,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84</b>	<b>531.564.393,00</b>
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Jawa Timur	100 %	531.564.393,00	APBD		100 %	531.564.393,00
1.03.11.1.02.00 07	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jawa Timur	100 Dokumen	531.564.393,00	APBD		100 Dokumen	531.564.393,00
<b>1</b>	<b>Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>								
<b>1.04</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>								
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>85</b>	<b>1.266.049.020,00</b>	<b>APBD</b>		<b>85</b>	<b>3.366.671.130,10</b>
		<b>Presentase realisasi anggaran</b>		<b>90%</b>				<b>90%</b>	
		<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>		<b>90,62%</b>				<b>90,62%</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)	Jawa Timur	12 Laporan	95.412.000,00	APBD		12 Laporan	95.412.000,00
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12 Dokumen	95.412.000,00	APBD		12 Dokumen	95.412.000,00
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Jawa Timur	11 Dokumen	767.089.100,00	APBD		11 Dokumen	767.089.100,00
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	77.424.000,00	APBD		1 Paket	77.424.000,00
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	39.856.600,00	APBD		1 Paket	39.856.600,00
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	64.188.500,00	APBD		1 Paket	64.188.500,00
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Dokumen	4.590.000,00	APBD		1 Dokumen	4.590.000,00
1.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	25.000.000,00	APBD		1 Paket	25.000.000,00
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	556.030.000,00	APBD		1 Laporan	556.030.000,00
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	11 Dokumen	20.000.000,00	APBD		11 Dokumen	20.000.000,00
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	1 Unit	20.000.000,00	APBD		1 Unit	20.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	297.087.920,00	APBD		12 Laporan	297.087.920,00
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1 Laporan	5.000.000,00	APBD		1 Laporan	5.000.000,00
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	292.087.920,00	APBD		1 Laporan	292.087.920,00
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Jawa Timur	12 Laporan	86.460.000,00	APBD		12 Laporan	86.460.000,00
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jawa Timur	1 Unit	33.600.000,00	APBD		1 Unit	33.600.000,00
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	1 Unit	27.860.000,00	APBD		1 Unit	27.860.000,00
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	25.000.000,00	APBD		1 Unit	25.000.000,00

# BAB 4

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

---

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang sesuai dengan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berperan serta mendukung prioritas pembangunan: **“Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan”** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

### **4.1 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2025**

Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mendukung sinkronisasi Program Prioritas Provinsi yaitu Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dan pelayanan dasar, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 10. Rencana Kerja yang mendukung Prioritas Pembangunan (dibalik)**

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Alokasi program prioritas	PERANG DAERA
P 4 – Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Penanganan Desa Rawan Kekeringan	Jumlah Penanganan desa rawan kekeringan (Desa)	40 desa	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	15.000.000.000,00		DPRKPC
	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	10 Ha	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	25.000.000.000,00		DPRKPC
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regiona	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang	3000 Lt/detik	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	75.000.000.000,00		DPRKPC

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Alokasi program prioritas	PERANG DAERA
		dikembangkan (air curah) (Lt/dtk)		PENYEDIAAN AIR MINUM	(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
						1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.000.000.000		DPRKPC
	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama sistem pengelolaan persampahan regional (kegiatan)	4 kegiatan	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	300.000.000		DPRKPC
		Pembangunan SPAD Terpusat (IPAL) dalam rangka integrasi penanganan kumuh		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA	850.000.000		DPRK

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Alokasi program prioritas	PERANG DAERA
P 4 – Keterpaduan Pengembangan Wilayah						1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	750.000.000		DPRK
	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Jumlah KK yang dilayani pembangunan IPAL komunal (KK)	50 KK	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	850.000.000		DPRK
P 4 – Keterpaduan Pengembangan Wilayah		Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama sistem pengelolaan persampahan regional (kegiatan)	4 kegiatan	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0007 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	500.000.000		DPRK
	Rumah Tingga Layak Huni (RUTILAHU) dan Jambanisasi	Jumlah RTLH yang telah direnovasi (unit)	1.990 unit	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di	1.04.03.1.02.0012 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	39.800.000.000		DPRK

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Alokasi program prioritas	PERANG DAERA
					Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Ha			



#### 4.2 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	85,05	7.902.130.813,07	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	Persen	90,05	37.118.091.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	persen	90,63	584.000.000,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	8	73.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1.927.000.000,00	Prioritas PD

<b>KODE</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	25.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	9.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1.907.000.000,00	Prioritas PD

<b>KODE</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	20.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>36.465.000.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	176	33.944.264.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.579.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	400.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	170.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	170.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	199.736.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>11.000.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	5.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1.03.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>35.000.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	35.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Ketatausahaan Dokumen dan Kepegawaian</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1.650.000.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	500.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	1.000.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	15.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	120.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>dokumen</b>	<b>11</b>	<b>2.546.000.000,00</b>	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	150.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	150.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	50.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	40	1.000.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.000.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	9.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Laporan</b>	<b>11</b>	<b>25.000.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>10.005.500.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.500.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.000.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>779.168.000,00</b>	Prioritas PD
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	368.168.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	120.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	261.000.000,00	Prioritas PD
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>Prioritas provinsi, Pencapaian SPM, Pencapaian SDGS, Pengentasan kemiskinan, Prioritas PD</b>
<b>1.03.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT yang terlayani akses air minum</b>	<b>RT</b>	<b>2400</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>Prioritas provinsi, Pencapaian SPM, Pencapaian SDGS, Pengentasan kemiskinan, Prioritas PD</b>
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	4.000.000.000,00	Prioritas provinsi, Pencapaian SPM



KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	150	200.000.000,00	Prioritas PD, Pencapaian SPM
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	20	75.800.000.000,00	Prioritas provinsi, Pencapaian SPM, Pencapaian SDGS, Pengentasan kemiskinan
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan</b>	<b>Persen</b>	<b>26.35</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>Prioritas provinsi, Prioritas PD</b>
<b>1.03.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan</b>	<b>Sistem</b>	<b>4</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>Prioritas provinsi, Prioritas PD</b>
1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten/Kota	11	300.000.000,00	Prioritas provinsi
1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	0,5	850.000.000,00	Prioritas provinsi
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	100	100.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	3	750.000.000,00	Prioritas provinsi
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak</b>	<b>Persen</b>	<b>97,5</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
<b>1.03.05.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah</b>	<b>Jiwa</b>	<b>500</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari	15	850.000.000,00	Pengentasan kemiskinan, Prioritas provinsi, Pencapaian SPM
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	100	150.000.000,00	Pencapaian SPM, Prioritas PD
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	500.000.000,000	Pencapaian SPM, Prioritas PD
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>Persen</b>	<b>9,35</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	Meter	1.000	1.500.000.000,00	Prioritas PD
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	4	1.500.000.000,00	Prioritas PD
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>Prioritas Provinsi</b>
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah rumah tangga yang terlayani infrastruktur permukiman	RT	500	10.000.000.000,00	Prioritas Provinsi
1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	ton/hari	0,012	500.000.000,00	Prioritas provinsi
1.03.07.1.01.0026	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Proviinsi	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Proviinsi yang dibangun	liter/detik	10	9.000.000.000,00	Prioritas provinsi
1.03.07.1.01.0033	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	m3/hari	15	500.000.000,00	Prioritas provinsi
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>137.540.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Gedung	8	137.540.000.000,00	Prioritas PD
1.03.08.6.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	220	710.000.000,00	Prioritas PD
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	15	358.000.000,00	Prioritas PD
1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	1	600.000.000,00	Prioritas PD
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	1	33.816.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	7	102.056.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Persen</b>	<b>36,4</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
<b>1.03.09.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	770.000.000,00	Prioritas PD
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	2	20.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.342.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.11.1.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>230</b>	<b>1.180.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	180	297.018.750,00	Prioritas PD
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50	882.981.250,00	Prioritas PD
1.03.11.1.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	3	100.000.000,00	Prioritas PD
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	5	50.000.000,00	Prioritas PD
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100	12.000.000,00	Prioritas PD
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang</b>	<b>Poin</b>	<b>82,5</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>295.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	200	295.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.12.1.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>20</b>	<b>1.055.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	10	850.000.000,00	Prioritas PD
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Berita Acara	10	205.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>1.850.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	10	750.000.000,00	Prioritas PD
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	700.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	400.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.03.12.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	1.700.000.000,00	Prioritas PD
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
<b>2.10.03.1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	10	370.000.000,00	Prioritas PD
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
<b>2.10.04.1.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi</b>	<b>kasus</b>	<b>1</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>



KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	80.000.000,00	Prioritas PD
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
<b>2.10.10.1.01</b>	<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	650.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur</b>	<b>Persen</b>	<b>8</b>	<b>661.920.000,00</b>	<b>Prioritas PD, Pencapaian SPM, Pengentasan kemiskinan</b>
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>661.920.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2	220.640.000,00	Pencapaian SPM
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	220.640.000,00	Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	2	220.640.000,00	Pencapaian SPM
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>persen</b>	<b>12,8</b>	<b>76.900.382.000,00</b>	<b>Pengentasan kemiskinan, Prioritas PD</b>
<b>1.04.03.1.01</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>persen</b>	<b>36,57</b>	<b>1.193.000.000,00</b>	<b>Pengentasan kemiskinan, Prioritas PD</b>
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	500.000.000,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi	1	100.000.000,00	Prioritas PD
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	3	593.000.000,00	Pengentasan kemiskinan
<b>1.04.03.1.02</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	<b>Ha</b>	<b>10</b>	<b>75.707.382.000,00</b>	<b>Pengentasan Kemiskinan, Prioritas Provinsi</b>
1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	2	50.207.382.000,00	Pengentasan kemiskinan, Prioritas Provinsi
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar	10	25.500.000.000,00	Pengentasan kemiskinan, Prioritas Provinsi
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>Persen</b>	<b>25</b>	<b>2.045.080.000,00</b>	<b>Pengentasan kemiskinan, Prioritas PD</b>

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	26	2.045.080.000,00	Pengentasan kemiskinan, Prioritas PD
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	9	135.766.400,00	Prioritas PD
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	26	1.735.313.600,00	Pengentasan kemiskinan
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	2	174.000.000,00	Prioritas PD
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	Persen	100	6.202.386.587,00	Prioritas PD
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Unit	973	6.202.386.587,00	Prioritas PD
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	5	6.202.386.587,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	Poin	83,5	531.564.393,00	Prioritas PD
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	100	531.564.393,00	Prioritas PD
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	9	531.564.393,00	Prioritas PD
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	85,05	3.255.282.165,75	Prioritas PD
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	presen	90,05	120.000.000,00	Prioritas PD
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	persen	90,63	0	Prioritas PD
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)	Laporan	12	95.412.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	95.412.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Dokumen	11	767.089.100,00	Prioritas PD

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	77.424.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.856.600,00	Prioritas PD
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	64.188.500,00	Prioritas PD
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.590.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	25.000.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	556.030.000,00	Prioritas PD
<b>1.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Laporan</b>	<b>11</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000,00	Prioritas PD
<b>1.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>297.087.920,00</b>	<b>Prioritas PD</b>

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
		<b>Daerah</b>				
1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	292.087.920,00	Prioritas PD
<b>1.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>86.460.000,00</b>	<b>Prioritas PD</b>
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	33.600.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.860.000,00	Prioritas PD
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000,00	Prioritas PD

# BAB 5

## PENUTUP

---

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian pembangunan Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa



Timur Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

## **5.2 Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.